



Kabupaten  
Mojokerto

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) BAPPEDA

TAHUN 2025



**Badan Perencanaan  
Pembangunan  
Daerah**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Bappeda Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah selama Tahun 2025.

LKjIP Tahun 2025 menyajikan informasi capaian kinerja yang diukur berdasarkan tujuan dan sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai sarana evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus untuk menilai tingkat ketercapaian kinerja perencanaan pembangunan daerah secara terukur dan sistematis.

Penyusunan LKjIP ini dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Analisis capaian kinerja disusun dengan membandingkan target dan realisasi yang dicapai, disertai penjelasan atas faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kinerja Bappeda Kabupaten Mojokerto selama Tahun 2025.

Akhir kata, LKjIP Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan pembangunan daerah pada periode selanjutnya.

Mojokerto, Januari 2026

Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah  
Kabupaten Mojokerto



Drs. BAMBANG EKO WAHYUDI, M.Si.  
NIP 19660618 199003 1 011



## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pada Tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun dua Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja yang disusun sesuai dengan kinerja periode perencanaan 2021-2025 serta Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun setelah penetapan periode perencanaan baru 2025-2029. Kondisi tersebut menempatkan Tahun 2025 sebagai tahun transisi yang menuntut konsistensi kinerja di tengah penyesuaian kerangka perencanaan.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan kinerja periode perencanaan 2021-2025 memuat sasaran dan indikator kinerja yang menjadi dasar pengukuran capaian kinerja perangkat daerah. Ringkasan capaian realisasi terhadap Perjanjian Kinerja dimaksud disajikan pada tabel berikut.

**Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025**  
**(sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025)**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1	Persentase Kinerja Pengendalian perencanaan Pembangunan daerah	100%	100%	100%
		1.2	Persentase Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%
		1.3	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Daerah yang dijalankan Perangkat Daerah	100%	100%	100%

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO.	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		84 (A)	85,09 (A)	101,30%
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		90,50%	93,64%	103,47%
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN		85,90	84,01	97,80%
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan			2 Inovasi	2 Inovasi	100%

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi, seluruh indikator pada sasaran meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah mencapai 100 persen, yang menunjukkan terjaganya kualitas pengendalian dan pemanfaatan data dalam proses perencanaan. Pada kinerja lainnya, indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah mencapai 101,30 persen, dan realisasi anggaran perangkat daerah mencapai 103,47 persen, yang mencerminkan tata kelola kinerja dan keuangan yang efektif.

Sementara itu, Indeks Profesionalitas ASN mencapai 97,80 persen, yang menunjukkan bahwa target belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan mekanisme pengelolaan dan pelaporan peningkatan kompetensi ASN yang berdampak pada perhitungan nilai indeks. Adapun indikator jumlah inovasi yang terinternalisasi dan berkelanjutan tercapai 100 persen, menunjukkan keberlanjutan upaya inovasi dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan.

Selanjutnya, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang disusun setelah penetapan periode perencanaan baru 2025-2029 menjadi dasar pengukuran kinerja pada kerangka perencanaan yang telah disesuaikan. Ringkasan capaian realisasi Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025**  
**(sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI PER TRIWULAN				REALISASI 2025	CAPAIAN
				I	II	III	IV		
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	IPPD (Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah)	79,70	-	-	-	85,87	85,87	107,74%
2	Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Dalam	Tingkat Adopsi Kebijakan	58,30	-	-	-	66,67	66,67	114,36%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI PER TRIWULAN				REALISASI 2025	CAPAIAN
				I	II	III	IV		
	Pembangunan Daerah	Berbasis Riset dan Inovasi							
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	84,00 (A)	-	-	85,09 (A)	-	85,09 (A)	101,30%

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) tercatat sebesar 85,87 dari target 79,70, atau mencapai 107,74 persen. Selain itu, indikator tingkat adopsi kebijakan berbasis riset dan inovasi mencapai nilai 66,67 dari target 58,30, atau setara dengan 114,36 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa pada tahap awal implementasi periode perencanaan baru, kualitas perencanaan serta pemanfaatan riset dan inovasi dalam kebijakan pembangunan daerah telah menunjukkan kinerja yang sangat baik.

Pada sasaran meningkatnya kualitas tata kelola penunjang pencapaian kinerja perangkat daerah, indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah mencapai 101,30 persen, yang menegaskan konsistensi penguatan sistem akuntabilitas kinerja dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Bappeda Kabupaten Mojokerto.

Secara agregat, capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 tercatat sebesar 107,80 persen, yang menunjukkan bahwa target kinerja dapat dicapai dan dilampaui. Capaian tersebut diperoleh dengan realisasi anggaran sebesar 93,64 persen, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi kinerja sebesar 14,16 persen. Kondisi ini mencerminkan bahwa pencapaian kinerja yang optimal dapat diwujudkan dengan pemanfaatan anggaran yang proporsional dan terkendali.

Kinerja keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 disajikan dalam tabel realisasi anggaran per program, yang menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara akuntabel dan selaras dengan pencapaian kinerja. Keterkaitan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran tersebut memperkuat bukti bahwa anggaran diarahkan untuk mendukung prioritas kinerja perangkat daerah.

Ke depan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja yang telah diraih melalui penguatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, peningkatan pemanfaatan riset dan inovasi dalam kebijakan, serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja. Upaya tersebut dilaksanakan secara selaras dengan arah perencanaan pembangunan daerah periode 2025-2029, sehingga kinerja perangkat daerah diharapkan dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	vi
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Gambaran Umum .....	2
1.3    Isu-Isu Strategis .....	5
1.4    Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	8
2.1    Penjenjangan Strategis.....	9
2.2    Indikator Kinerja Utama .....	26
2.3    Perjanjian Kinerja.....	35
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	39
3.1    Pengukuran Kinerja .....	40
3.2    Analisis Kinerja.....	44
3.3    Prestasi Kinerja Lainnya .....	76
3.4    Akuntabilitas Anggaran.....	80
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	85
4.1    Pembelajaran dan Tantangan Kinerja .....	85
4.2    Arah dan Upaya Peningkatan Kinerja ke Depan .....	86
<b>LAMPIRAN.....</b>	87

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.a Matriks Penjenjangan Strategis 2021-2025 .....	11
Tabel 2.1.b Matriks Penjenjangan Strategis.....	19
Tabel 2.2.a Indikator Kinerja Utama 2021-2025.....	27
Tabel 2.2.b Indikator Kinerja Utama .....	33
Tabel 2.3.a Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025.....	35
Tabel 2.3.a Anggaran Per Program.....	36
Tabel 2.3.b Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Berasadarkan Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029.....	37
Tabel 2.3.b Anggaran Per Program.....	38
Tabel 3.1.1 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025).....	41
Tabel 3.1.2 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029).....	42
Tabel 3.2.1.a Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	45
Tabel 3.2.1.b Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	49
Tabel 3.2.2.a Perbandingan Realisasi Kinerja sesuai Dokumen Perencanaan .....	52
Tabel 3.2.2.b Perbandingan Realisasi Kinerja sesuai Dokumen Perencanaan .....	53
tabel 3.2.2.c Perbandingan Realisasi Kinerja Program sesuai Dokumen Perencanaan 2021-2025 dan APBD Tahun 2025.....	54
Tabel 3.2.2.d Perbandingan Realisasi Kinerja Program sesuai Dokumen Perencanaan 2025-2029 dan Perubahan APBD Tahun 2025.....	56
Tabel 3.2.3.a Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Renstra 2021-2025.....	58
Tabel 3.2.3.b Perbandingan Realisasi Kinerja Program terhadap Renstra 2021-2025 .....	59
Tabel 3.2.3.c Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Renstra 2025-2029 .....	60
Tabel 3.2.3.d Perbandingan Realisasi Kinerja Program terhadap Renstra 2025-2029 .....	61
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Provinsi, maupun Kementerian/Lembaga .....	77
Tabel 3.4.1 Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	81
Tabel.3.4.2 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran.....	81

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappeda .....	4
Grafik 3.3 Perbandingan Prestasi Kinerja Bappeda Kabupaten Mojokerto.....	78

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban setiap instansi pemerintah sebagai bagian dari penerapan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto menyusun LKjIP sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kewajiban tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menempatkan laporan kinerja sebagai instrumen utama pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Peraturan ini menegaskan bahwa akuntabilitas kinerja tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kewajiban pelaporan, tetapi sebagai kemampuan instansi dalam menunjukkan keterkaitan yang jelas antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kinerja yang dicapai.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 memberikan pedoman teknis mengenai penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja instansi pemerintah. Regulasi ini mengarahkan agar laporan kinerja disusun secara sistematis, berbasis indikator kinerja yang terukur, serta disertai analisis atas capaian kinerja. Dengan pendekatan tersebut, laporan kinerja tidak diposisikan sebagai dokumen administratif semata, melainkan sebagai media evaluasi yang mampu menggambarkan tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Secara konseptual, laporan kinerja merupakan dokumen yang menyajikan informasi mengenai tingkat pencapaian kinerja instansi pemerintah dalam satu periode tertentu, yang diukur berdasarkan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja. Informasi yang disajikan dalam laporan ini tidak berhenti pada perbandingan antara target dan realisasi, tetapi dilengkapi dengan analisis yang menjelaskan makna capaian kinerja tersebut. Melalui analisis ini, laporan kinerja diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai kinerja instansi, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil.

Proses penyusunan laporan kinerja dilaksanakan melalui tahapan pengumpulan dan pengolahan data kinerja, pengukuran capaian indikator, serta analisis atas hasil yang diperoleh. Proses ini menuntut konsistensi antara perencanaan kinerja yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun berjalan. Keandalan data, ketepatan pengukuran, serta kecermatan analisis menjadi prasyarat agar laporan kinerja yang disusun dapat mencerminkan kondisi kinerja instansi secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, laporan kinerja memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan, baik perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Sasaran dan indikator kinerja yang dilaporkan dalam LKjIP bersumber dari dokumen perencanaan tersebut, sehingga laporan kinerja berfungsi sebagai sarana untuk menilai konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaannya. Keterkaitan ini menempatkan LKjIP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari siklus manajemen kinerja instansi pemerintah.

Hasil evaluasi dan analisis yang disajikan dalam laporan kinerja memiliki peran strategis sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan pada periode selanjutnya. Informasi mengenai capaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta pembelajaran yang diperoleh menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dalam perumusan sasaran, indikator, maupun strategi pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, LKjIP tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban kinerja, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran yang mendukung peningkatan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan daerah secara berkelanjutan.

## 1.2 Gambaran Umum

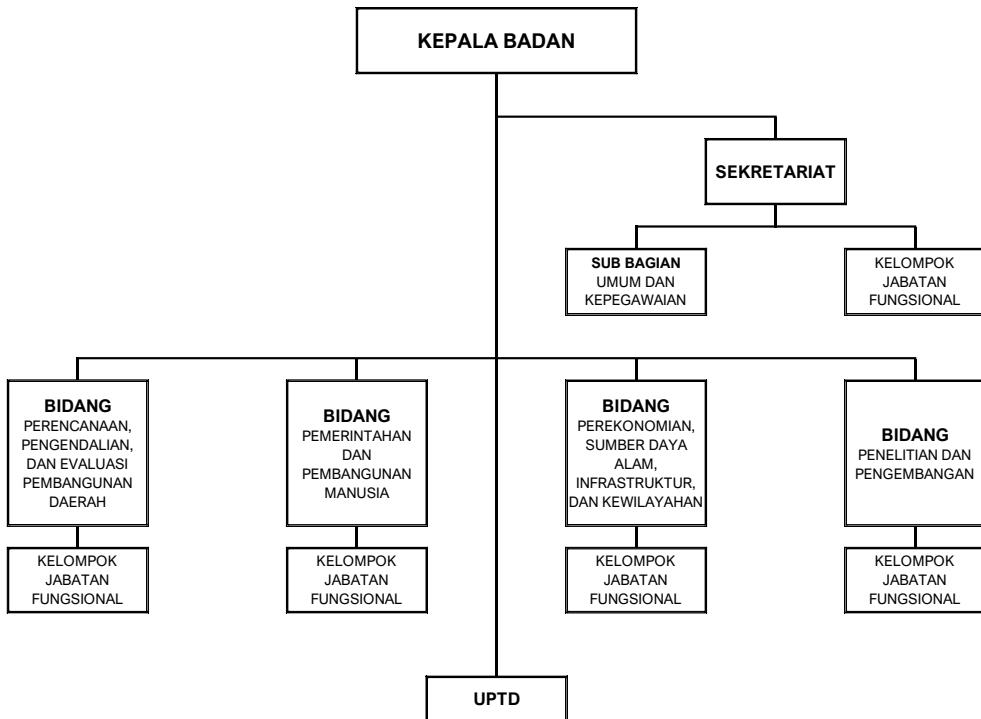
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan perangkat daerah yang berperan sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan daerah. Secara kelembagaan, Bappeda berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kantor Bappeda berlokasi di Lingkup Kantor Bupati Mojokerto, Jalan Ahmad Yani Nomor 16, Mergelo, Magersari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61311, yang menjadi pusat koordinasi pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan di daerah.

Kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Bappeda Kabupaten Mojokerto diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 97 Tahun 2021. Berdasarkan pengaturan tersebut, Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Tugas tersebut dijalankan melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta penyelenggaraan administrasi yang mendukung pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan di daerah secara menyeluruh.

Dalam menjalankan perannya, Bappeda Kabupaten Mojokerto melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan daerah sebagai satu kesatuan proses yang saling terkait. Kegiatan perencanaan pembangunan difungsikan sebagai proses penyusunan rencana yang disusun dan dilaksanakan secara sistematis, dengan produk perencanaan yang dirumuskan berdasarkan pemikiran logis dan objektif sebagai tahapan awal dalam proses pembangunan daerah. Sejalan dengan itu, fungsi penelitian dan pengembangan dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data serta kajian tematik dan kewilayahan, yang bertujuan menghasilkan dasar pengetahuan dan rekomendasi kebijakan yang mendukung kualitas perencanaan. Dengan pendekatan tersebut, perencanaan dan penelitian diharapkan bersifat implementatif dan aplikatif, serta mampu memberikan landasan yang kuat bagi pelaksanaan pembangunan daerah.

Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Mojokerto dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan didukung oleh Sekretariat yang membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian serta Kelompok Jabatan Fungsional. Selain itu, Bappeda memiliki beberapa bidang teknis yang meliputi Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan; serta Bidang Penelitian dan Pengembangan. Pelaksanaan tugas juga didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun struktur organisasi Bappeda sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 97 Tahun 2021 dapat digambarkan sebagaimana dalam gambar berikut dibawah ini:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappeda

Dari sisi sumber daya, Bappeda Kabupaten Mojokerto didukung oleh aparatur sipil negara dengan jumlah 45 orang yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Komposisi sumber daya manusia tersebut memiliki latar belakang pendidikan dan jenjang jabatan yang beragam, yang menjadi modal pendukung dalam pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan daerah yang bersifat strategis. Dukungan sumber daya manusia ini memungkinkan Bappeda menjalankan peran koordinatif, analitis, dan evaluatif secara berkesinambungan dalam mendukung perumusan kebijakan dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda juga didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan aset penunjang. Hingga Tahun 2025, Bappeda memiliki aset dengan jumlah keseluruhan 439 unit yang mencakup bangunan gedung kantor, kendaraan operasional, peralatan perkantoran, meubel, perangkat teknologi informasi, serta sarana pendukung lainnya. Ketersediaan aset tersebut menjadi penunjang penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan daerah, termasuk kegiatan koordinasi, analisis, dan evaluasi pembangunan.

### **1.3 Isu-Isu Strategis**

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto perlu dipahami dalam kerangka pelayanan strategis kelembagaan, bukan semata layanan publik langsung. Pelayanan Bappeda diwujudkan melalui fungsi koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, penyediaan data dan informasi, serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti. Dalam konteks tersebut, tingkat kinerja pelayanan Bappeda sangat ditentukan oleh kemampuannya menjalankan peran sebagai simpul integrasi kebijakan lintas sektor dan lintas jenjang pemerintahan. Kompleksitas mandat ini menjadikan kualitas koordinasi, ketepatan analisis, dan keandalan data sebagai faktor kritis dalam menilai efektivitas pelayanan perangkat daerah.

Dalam pelaksanaannya, Bappeda Kabupaten Mojokerto masih menghadapi sejumlah permasalahan dan hambatan yang bersifat struktural dan implementatif. Keterpaduan substansi antar dokumen perencanaan belum sepenuhnya optimal, baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga masih ditemukan tumpang tindih kebijakan dan lemahnya keterkaitan antarprogram perangkat daerah. Di sisi lain, pengelolaan sistem informasi dan data pembangunan belum sepenuhnya terintegrasi dan mutakhir, yang berdampak pada terbatasnya dukungan data yang komprehensif dalam proses perencanaan dan evaluasi. Hambatan lainnya tercermin pada belum terlembaganya pemanfaatan hasil evaluasi dan kajian sebagai dasar utama pengambilan keputusan, serta rendahnya konversi hasil penelitian dan pengembangan menjadi kebijakan formal.

Permasalahan tersebut berdampak langsung terhadap efektivitas pencapaian arah pembangunan daerah. Lemahnya integrasi perencanaan dan pemanfaatan data berpotensi mengurangi ketepatan sasaran pembangunan dan memperlambat pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam visi dan misi kepala daerah. Kondisi ini juga mempengaruhi kemampuan daerah dalam menyelaraskan kebijakan dengan kerangka kebijakan nasional dan agenda global, termasuk pemenuhan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pencapaian pelayanan dasar, serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Perencanaan yang belum sepenuhnya berbasis data dan evaluasi berisiko melemahkan kualitas

intervensi kebijakan pada isu-isu strategis seperti kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, ketahanan lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang efektif.

Di tengah berbagai keterbatasan tersebut, Bappeda Kabupaten Mojokerto juga dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kelembagaan. Transformasi kebijakan nasional, penguatan sistem pemerintahan berbasis data, serta meningkatnya tuntutan terhadap kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan membuka ruang bagi penguatan peran Bappeda sebagai pengarah kebijakan strategis. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengembangan mekanisme perencanaan berbasis evaluasi dan penelitian menjadi peluang penting untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan daya dukung kelembagaan terhadap pembangunan daerah. Berdasarkan kondisi tersebut, isu-isu strategis Bappeda Kabupaten Mojokerto dirumuskan pada penguatan sinergi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah, penguatan sistem informasi dan data perencanaan, pengarusutamaan perencanaan berbasis evaluasi, peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam kebijakan, serta penguatan ekosistem inovasi daerah. Isu-isu ini mencerminkan kebutuhan untuk memperkuat peran Bappeda tidak hanya sebagai penyusun dokumen perencanaan, tetapi sebagai penggerak kebijakan pembangunan yang berbasis pengetahuan, kolaboratif, dan berorientasi hasil.

Rumusan isu strategis tersebut menjadi catatan penting dan rekomendasi strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan pada periode perencanaan berikutnya. Dengan menjadikan isu-isu ini sebagai dasar penyusunan kebijakan, diharapkan program dan kegiatan Bappeda ke depan mampu menjawab permasalahan substantif, memperkuat kualitas perencanaan dan penelitian pembangunan daerah, serta meningkatkan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 disusun dalam empat bab yang saling terkait dan membentuk satu kesatuan utuh dalam penyajian informasi kinerja instansi pemerintah.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan gambaran awal mengenai latar belakang disusunnya LKjIP sebagai instrumen pertanggungjawaban kinerja. Pada bab ini juga disampaikan profil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto yang meliputi gambaran umum perangkat daerah, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta isu-isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan kinerja. Selain itu, bab ini memuat sistematika penulisan LKjIP sebagai panduan dalam memahami alur penyajian laporan secara keseluruhan.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini memuat ringkasan perencanaan kinerja yang menjadi dasar pelaksanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah. Bab ini menyajikan keterkaitan antara perencanaan strategis dengan perjanjian kinerja, termasuk tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja Tahun 2025.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menyajikan hasil capaian kinerja berdasarkan realisasi yang telah dicapai dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pada bab ini disampaikan analisis atas capaian indikator kinerja yang didukung oleh data pendukung, termasuk penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja. Selain itu, bab ini juga memuat rencana tindak lanjut dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang dihadapi, serta penyajian realisasi anggaran sebagai bagian dari akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan umum atas pelaksanaan dan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto selama Tahun 2025. Bab ini juga memuat harapan dan upaya yang akan dilakukan pada tahun-tahun selanjutnya sebagai langkah perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai kerangka perencanaan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai dasar pelaksanaan dan pelaporan kinerja Tahun 2025. Perencanaan kinerja diposisikan sebagai tahapan strategis yang menjembatani arah kebijakan pembangunan daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah secara terukur dan sistematis.

Perencanaan kinerja Bappeda Kabupaten Mojokerto disusun dengan memperhatikan keselarasan antara visi dan misi kepala daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran perangkat daerah. Keselarasan tersebut diwujudkan melalui penjenjangan strategis yang memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan memiliki keterkaitan langsung dengan arah pembangunan daerah dan mandat kelembagaan Bappeda, baik dalam fungsi perencanaan pembangunan daerah maupun penelitian dan pengembangan daerah. Selain itu, perencanaan kinerja dalam bab ini juga menegaskan indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Mojokerto. Indikator kinerja utama tersebut disusun berdasarkan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah dan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Indikator ini menjadi instrumen utama dalam mengukur efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Mojokerto secara objektif, konsisten, dan dapat ditelusuri dalam kerangka akuntabilitas kinerja.

Sebagai penutup kerangka perencanaan, bab ini juga memuat perjanjian kinerja yang disepakati dan ditandatangani antara Bupati Mojokerto selaku atasan langsung dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai komitmen kinerja tahunan. Perjanjian kinerja tersebut menjadi dasar pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja, serta menjadi rujukan utama dalam menilai capaian kinerja dan penggunaan anggaran pada Bab Akuntabilitas Kinerja.

## **2.1 Penjenjangan Strategis**

Perencanaan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto disusun melalui penjenjangan strategis yang memastikan keterhubungan antara arah pembangunan daerah dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Penjenjangan ini menjadi kerangka utama dalam menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, hingga program, kegiatan, dan subkegiatan Bappeda secara konsisten dan terukur.

### **A. Penjenjangan Strategis Berdasarkan Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025**

Sebagai bagian dari kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, penjenjangan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2025 juga merujuk pada dokumen perencanaan periode 2021-2025. Berdasarkan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/280/HK/416-012/2023 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2025, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menetapkan satu visi pembangunan daerah yang didukung oleh empat misi pembangunan.

Visi pembangunan Kabupaten Mojokerto pada periode 2021-2025 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.”** Visi tersebut menjadi arah utama pembangunan daerah dan menjadi pijakan bagi seluruh perangkat daerah, termasuk Bappeda Kabupaten Mojokerto, dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada akhir periode perencanaan.

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menetapkan empat misi pembangunan, yaitu:

1. mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif yang dilandasi nilai keimanan dan ketakwaan;
2. membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan;
3. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan; serta
4. pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di seluruh sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan.

Dalam kerangka penjenjangan kinerja daerah periode 2021-2025, Bappeda Kabupaten Mojokerto memiliki kontribusi utama pada pelaksanaan misi ketiga, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan. Kontribusi tersebut dijalankan melalui fungsi perencanaan pembangunan daerah serta fungsi penelitian dan pengembangan daerah sebagai landasan penguatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan misi tersebut, tujuan Pemerintah Daerah yang menjadi rujukan kinerja Bappeda Kabupaten Mojokerto adalah “**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan.**” Tujuan ini kemudian diturunkan ke dalam sasaran Pemerintah Daerah, yaitu “**Terwujudnya integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto,**” dengan indikator kinerja berupa Nilai SAKIP Pemerintah Daerah. Sasaran Pemerintah Daerah ini secara utuh menjadi tujuan Bappeda Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan prinsip penjenjangan kinerja dari level pemerintah daerah ke perangkat daerah.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, Bappeda Kabupaten Mojokerto pada periode 2021-2025 menetapkan satu sasaran strategis, yaitu meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah. Sasaran strategis tersebut diukur melalui indikator berupa persentase kinerja pengendalian perencanaan pembangunan daerah, persentase pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta persentase rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan daerah yang dijalankan oleh perangkat daerah. Penetapan indikator tersebut mencerminkan fokus Bappeda dalam memastikan kualitas proses perencanaan dan efektivitas pemanfaatan hasil perencanaan dalam pembangunan daerah.

Penjabaran sasaran strategis tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan Bappeda Kabupaten Mojokerto, dengan nomenklatur yang konsisten dengan dokumen perencanaan periode berikutnya. Kesinambungan nomenklatur ini menunjukkan bahwa pada masa transisi menuju periode perencanaan 2025-2029, struktur perencanaan operasional Bappeda tetap dijaga agar tidak terjadi disrupsi terhadap pelaksanaan fungsi perencanaan serta penelitian dan pengembangan daerah.

Untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, hingga program, kegiatan, dan subkegiatan Bappeda Kabupaten Mojokerto pada periode 2021-2025, disajikan Matriks Penjenjangan Strategis Periode

2021-2025. Matriks tersebut menunjukkan hubungan hierarkis antar level perencanaan kinerja, yang menjadi dasar pelaksanaan dan pengendalian kinerja Bappeda pada akhir periode perencanaan.

Tabel 2.1.a Matriks Penjenjangan Strategis 2021-2025

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
1	2	3	
<b>Terwujudnya integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto</b>		<b>Nilai SAKIP Pemerintah Daerah</b>	<b>79,05 (BB)</b>
<b>Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah</b>	Persentase Kinerja Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	
	Persentase Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	100%	
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Daerah yang dijalankan Perangkat Daerah	100%	
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 (A)	
	Persentase Realisasi Anggaran	91%	
	IP ASN	85,90%	
	Jumlah inovasi yang memenuhi 20 Indikator Indeks Inovasi Daerah Kemendagri	2 Inovasi	
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 laporan
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Realisasi Anggaran yang tercapai</b>	<b>90,50 %</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang/bulan
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai</b>	<b>100%</b>

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Target
1				2	3
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 paket
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	4 dokumen
Penyediaan Bahan / Material				Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	3 paket
Fasilitasi Kunjungan Tamu				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan
Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>Percentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>100%</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik				Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>Percentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik</b>	<b>100%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayatkan pajaknya	40 Kendaraan
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah unit Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	6 unit

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Target
1			2	3
<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>			IK 1 :Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan IK 2 : Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan IK 3 : Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan	IK 1 : 100% IK 2 : 100% IK 3 : 100%
<b>PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN</b>			Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antar dokumen perencanaan daerah serta dengan dokumen instansi vertikal	100%
Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJD/RPJMD/RKPD)	3 dokumen
<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			Persentase data dan informasi yang relevan dan akurat	100%
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 dokumen
<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			Persentase Capaian Target Kinerja Pemerintah Daerah	100%
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 laporan
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 laporan
<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan di bidang/tematik; IK 2 : Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan	IK 1 : 100%; IK 2 : 100%

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Target
1			2	3
			Pembangunan di bidang/tematik	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<p>IK 1 : Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antara dokumen perencanaan bidang/tematik PPM dengan dokumen pemda</p> <p>IK 2 : Persentase capaian kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik PPM</p> <p>IK 3 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang PPM</p>	<p>IK 1 : 100%</p> <p>IK 2 : 100%</p> <p>IK 3 : 100%</p>
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Laporan
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	10 Laporan
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	<p>IK 1 : Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antara dokumen perencanaan bidang/tematik PSDA dengan dokumen pemda</p> <p>IK 2 : Persentase capaian kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik PSDA</p>	<p>IK 1 : 100%</p> <p>IK 2 : 100%</p> <p>IK 3 : 100%</p>

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Target
1				2	3
				IK 3 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang PSDA	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah		IK 1 : Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antara dokumen perencanaan bidang/tematik IW dengan dokren pemda IK 2 : Persentase capaian kinerja Perencanaan Pembangunan	IK 1 : 100% IK 2 : 100% IK 3 : 100%

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Target
1				2	3
				Bidang/Tematik IW IK 3 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang IW	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	7 Laporan
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayah	2 laporan
<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>				<b>Persentase Kesesuaian Agenda Riset dengan Isu Strategis Daerah</b>	<b>100%</b>
		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>		<b>Persentase Laporan Identifikasi Isu Strategis yang dimanfaatkan</b>	<b>100%</b>
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan
		<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>		<b>Persentase Hasil-Hasil Riset yang difasilitasi</b>	<b>100%</b>
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	1 Laporan

Berdasarkan matriks tersebut, terlihat bahwa struktur penjenjangan kinerja Bappeda pada periode 2021-2025 telah tersusun secara hierarkis mulai dari sasaran Pemerintah Daerah hingga level program dan kegiatan. Seluruh indikator kinerja pada level program dan kegiatan dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah serta sasaran Pemerintah Daerah, dengan tetap menjaga konsistensi arah pembangunan dan tata kelola kinerja.

Dengan berakhirnya periode RPJMD 2021-2025 dan ditetapkannya dokumen perencanaan periode 2025-2029, penjenjangan strategis Bappeda Kabupaten Mojokerto mengalami penyesuaian sasaran dan indikator kinerja. Meskipun terdapat penguatan dan penajaman arah kebijakan, kesinambungan fungsi perencanaan pembangunan dan penelitian serta pengembangan daerah tetap dipertahankan sebagai fondasi utama kinerja perangkat daerah.

Selanjutnya, penjenjangan strategis Bappeda Kabupaten Mojokerto berdasarkan dokumen perencanaan periode 2025-2029 diuraikan pada bagian berikut.

## **B. Penjenjangan Strategis Berdasarkan Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029**

Arah pembangunan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui visi pembangunan daerah, yaitu “**Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur.**” Visi ini menjadi pijakan utama seluruh kebijakan pembangunan daerah dan menjadi referensi bersama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun perencanaan kinerja, termasuk Bappeda Kabupaten Mojokerto sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat strategis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menetapkan empat misi pembangunan yang dirumuskan dalam Catur Abhipraya Mubarok. Keempat misi tersebut adalah:

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 2) Mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh, cerdas, terampil, produktif, dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketenteraman masyarakat;

- 3) Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan usaha mikro serta BUM Desa yang berbasis masyarakat guna mewujudkan keluarga yang sejahtera; serta
- 4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan mendukung akses sosial, budaya, serta pelestarian lingkungan.

Dalam kerangka penjenjangan kinerja daerah, Bappeda Kabupaten Mojokerto memiliki kontribusi utama pada pelaksanaan misi pertama, khususnya dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi perencanaan serta penelitian dan pengembangan daerah.

Sejalan dengan misi tersebut, tujuan Pemerintah Daerah yang menjadi rujukan kinerja Bappeda adalah “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, transparan, akuntabel, dan responsif.” Tujuan ini kemudian diturunkan ke dalam sasaran Pemerintah Daerah, yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah”, dengan indikator kinerja berupa Nilai SAKIP Pemerintah Daerah. Sasaran Pemerintah Daerah ini secara utuh menjadi tujuan Bappeda Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan prinsip penjenjangan kinerja dari level pemerintah daerah ke perangkat daerah.

Dengan demikian, tujuan Bappeda Kabupaten Mojokerto pada periode 2025-2029 diarahkan pada meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, yang diukur melalui Nilai SAKIP Pemerintah Daerah. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, Bappeda menetapkan dua sasaran strategis utama, yaitu meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan meningkatnya peran riset serta inovasi dalam pembangunan daerah. Kedua sasaran tersebut masing-masing diukur melalui Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dan Tingkat Adopsi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi, yang mencerminkan peran Bappeda dalam memastikan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berbasis pengetahuan.

Selain sasaran utama, Bappeda Kabupaten Mojokerto juga menetapkan sasaran penunjang yang bersifat internal kelembagaan, yaitu meningkatnya kualitas tata kelola penunjang pencapaian kinerja perangkat daerah. Sasaran penunjang ini diukur melalui Nilai SAKIP Perangkat Daerah, yang merepresentasikan kualitas pengelolaan kinerja internal Bappeda sebagai prasyarat dalam menjalankan peran strategisnya sebagai penggerak akuntabilitas kinerja daerah.

Penjabaran tujuan dan sasaran tersebut selanjutnya diwujudkan melalui program, kegiatan, dan subkegiatan Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Program yang ditetapkan mencakup fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, serta program penunjang urusan pemerintahan daerah. Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan tersebut dirancang sebagai instrumen operasional untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan, baik pada fungsi perencanaan pembangunan daerah maupun fungsi penelitian dan pengembangan daerah.

Untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan, disajikan matriks penjenjangan strategis Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Matriks ini menunjukkan hubungan hierarkis dan logis antar level perencanaan kinerja, yang menjadi dasar pelaksanaan dan pengendalian kinerja Bappeda pada Tahun 2025.

Tabel 2.1.b Matriks Penjenjangan Strategis 2025-2029

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
1		2	3
<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah</b>		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	79,05 (BB)
	<b>Meningkatnya Kualitas Perencanaan</b>	IPPD (Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah)	79,70
	<b>Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah</b>	Tingkat Adopsi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi	58,30
	<b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,00 (A)
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota</b>	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,71
		Persentase Realisasi Anggaran	90,50%
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Kinerja Perangkat Daerah yang tercapai Minimal 90%	93%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 laporan

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Target
1				2	3
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		1. Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar; 2. Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar; 3. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan
			Penyediaan Bahan / Material		Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		1. Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar; 2. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Target
1				2	3
				Kantor yang disediakan	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar</b>	<b>100%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayatkan pajaknya	40 Kendaraan
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah unit Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	6 unit
<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>				<b>1. Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan Daerah; 2. Persentase Indikator Pembangunan yang Didukung Data Terstandar (konsep, metadata, sumber, satuan, jadwal publikasi jelas); 3. Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah.</b>	<b>IK 1 : 90% IK 2 : 80% IK 3 : 85%</b>
<b>PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN</b>				Tingkat Kepatuhan terhadap Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan	90%
Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota				Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKP D)	3 dokumen
<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				<b>Persentase Indikator Pembangunan yang Dilengkapi Metadata Standar (definisi,</b>	<b>80%</b>

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Target
1				2	3
				sumber, formulasi, satuan)	
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)  1 dokumen
				<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	1. Rata-rata Capaian Kinerja PD; 2. Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan.  IK 1 : 85% IK 2 : 100%
				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan  1 laporan
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah  1 laporan
				<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	1. Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang/tematik; 2. Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang/Tematik.  IK 1 : 90% IK 2 : 85%
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. Tingkat Kepatuhan terhadap Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang/ Tematik PPM; 2. Rata-rata Capaian Kinerja PD Bidang/Tematik PPM; 3. Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan Bidang/Tematik PPM.  IK 1 : 90% IK 2 : 85% IK 3 : 100%

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Target
1				2	3
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia
				<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>1. Tingkat Kepatuhan terhadap Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang/ Tematik PSDA; 2. Rata-rata Capaian Kinerja PD Bidang/Tematik PSDA; 3. Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan Bidang/Tematik PSDA.</b>
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Target
1				2	3
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>				<b>1. Tingkat Kepatuhan terhadap Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang/ Tematik Infrastruktur Dan Kewilayah; 2. Rata-rata Capaian Kinerja PD Bidang/Tematik Infrastruktur Dan Kewilayah; 3. Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan Bidang/Tematik Infrastruktur Dan Kewilayah.</b>	<b>IK 1 : 90% IK 2 : 85% IK 3 : 100%</b>
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	7 Laporan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kewilayah				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan	2 laporan

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Target
1				2	3
				RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahana	
		<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>		<b>IK 1 : Persentase Kesesuaian Agenda Riset dengan Isu Strategis Daerah IK 2 : Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Riset dan Inovasi Daerah</b>	<b>IK 1 : 80% IK 2 : 85%</b>
		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>		Jumlah Laporan/Dokumen Verifikasi Daftar Agenda Riset di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan
		<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>		<b>Persentase Hasil-Hasil Riset dan Inovasi yang difasilitasi</b>	<b>85,00%</b>
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangana		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangana	1 Laporan

Matriks penjenjangan strategis disusun untuk menunjukkan keterkaitan yang utuh antara arah kebijakan pembangunan daerah dengan perencanaan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Matriks ini berfungsi sebagai alat bantu untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada level pemerintah daerah dapat diturunkan secara konsisten ke dalam sasaran perangkat daerah, serta diterjemahkan lebih lanjut ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersifat operasional.

Melalui matriks tersebut, dapat ditelusuri hubungan hierarkis antara sasaran Pemerintah Daerah dengan tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Mojokerto.

Penjenjangan ini memastikan bahwa peran Bappeda sebagai perangkat daerah pengampu fungsi perencanaan serta penelitian dan pengembangan daerah tidak berdiri terpisah, melainkan menjadi bagian integral dari upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Dengan demikian, setiap intervensi program dan kegiatan Bappeda memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian sasaran kinerja daerah yang lebih luas.

Matriks penjenjangan strategis juga memberikan gambaran mengenai konsistensi antara sasaran kinerja utama dan sasaran penunjang perangkat daerah. Sasaran utama Bappeda yang berfokus pada peningkatan kualitas perencanaan serta penguatan peran riset dan inovasi diposisikan sebagai pengungkit pencapaian tujuan akuntabilitas kinerja daerah, sementara sasaran penunjang diarahkan untuk memastikan tata kelola internal perangkat daerah berjalan secara akuntabel dan berkelanjutan. Penempatan indikator kinerja pada masing-masing level menunjukkan adanya pemisahan yang jelas antara indikator kinerja Pemerintah Daerah dan indikator kinerja perangkat daerah.

Secara keseluruhan, matriks penjenjangan strategis menjadi kerangka pengikat antara perencanaan strategis dan perencanaan operasional Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Matriks ini tidak dimaksudkan sebagai alat analisis kinerja, melainkan sebagai representasi struktur logis perencanaan kinerja yang menjadi dasar dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja pada tahapan selanjutnya.

## 2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. IKU menjadi instrumen pengendali kinerja yang menjembatani antara penjenjangan strategis sebagaimana diuraikan pada subbab sebelumnya dengan pelaksanaan dan pelaporan kinerja pada Tahun 2025. Dengan demikian, IKU tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai pengikat konsistensi antara perencanaan strategis dan kinerja operasional perangkat daerah. Sejalan dengan dinamika periode perencanaan yang berlangsung pada Tahun 2025, penetapan Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Mojokerto merujuk pada dua dokumen perencanaan, yaitu dokumen periode 2021-2025 dan dokumen periode 2025-2029. Kedua kerangka tersebut menjadi dasar dalam menetapkan indikator

pada level sasaran perangkat daerah, sehingga pengukuran kinerja tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

### **A. Indikator Kinerja Utama Periode 2021-2025**

Pada periode perencanaan 2021-2025, Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Mojokerto ditetapkan berdasarkan sasaran strategis perangkat daerah, yaitu Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah. IKU pada periode ini dirumuskan untuk mengukur mutu proses pengendalian perencanaan, pemanfaatan data dan informasi pembangunan, serta efektivitas rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan.

Setiap indikator dilengkapi dengan satuan pengukuran, formulasi perhitungan yang jelas, serta sumber data yang dapat ditelusuri. Kejelasan definisi operasional tersebut menjadi prasyarat agar pengukuran kinerja dapat dilaksanakan secara objektif dan konsisten dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Mojokerto periode 2021-2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.2.a Indikator Kinerja Utama 2021-2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Percentase Kinerja Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Percentase	(Percentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan + Percentase Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah) / 2  1. Percentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan diukur dari: a. Keselarasan Dokrenda Kabupaten Mojokerto terhadap Dokrenda Provinsi dan Dokren Pemerintah Pusat (aspek prioritas, tujuan,	1. RPJMD; 2. Renstra; 3. RKPD; 4. Renja; dan 5. Laporan Pelaksanaan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Bidang Rendalev, PPM, dan PSDAIW

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>dan sasaran yang ditetapkan, penyajian substansi, program, indikator serta target);</p> <p>b. Keselarasan RKPD terhadap RPJMD (aspek prioritas pembangunan yang ditetapkan, penyajian substansi, program, indikator serta target);</p> <p>c. Keselarasan Renstra terhadap RPJMD (aspek prioritas, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan, penyajian substansi, program, indikator serta target);</p> <p>d. Keselarasan Renja terhadap Renstra (aspek prioritas Perangkat Daerah yang ditetapkan, penyajian substansi, program, kegiatan, subkegiatan, indikator serta target); dan</p> <p>e. Keselarasan Renja terhadap RKPD (aspek prioritas pembangunan yang ditetapkan, penyajian substansi, program, indikator serta target).</p>	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				2. Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah diukur dari: a. Pencapaian Target Perencanaan Pembangunan yang sudah ditetapkan pada RKPD tahun berjalan.	
				Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase (Jumlah dataset yang disepakati Perangkat Daerah pada Berita Acara Forum Satu Data Palapa dibagi Jumlah OPD yang memanfaatkan data tersebut) x 100%
				Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Daerah yang dijalankan Perangkat Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan yang diberikan merupakan Hasil dari Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi berupa Hasil Kajian, Policy Paper, Policy Brief, dan sebagainya yang serupa. Pengukuran Indikator Kinerjanya : (Jumlah hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang dijalankan oleh Perangkat Daerah terkait dibagi Jumlah hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi terkait isu strategis pembangunan daerah pada tahun berjalan) x 100%

No.	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif,	Nilai SAKIP Bappeda	Nilai	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Ket Nilai SAKIP : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat

No.	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
2.	<p>efisien, dan akuntabel</p> <p>Optimalnya Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah</p>	<p>Persentase Realisasi Anggaran Bappeda</p> <p>Indeks Profesionalitas ASN Bappeda</p> <p>Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Bappeda</p>	<p>Persentase</p> <p>Nilai</p> <p>Jumlah</p>	<p>Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 - 70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 - 90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100</p> <p>(Realisasi Anggaran / Pagu Anggaran) x 100%</p> <p>Ket IP ASN : Kategori Sangat Rendah : &lt;= 60 Kategori Rendah : 61 – 70 Kategori Sedang : 71 – 80 Kategori Tinggi : 81 – 90 Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100</p> <p>Inovasi yang terinternalisasi Adalah Ketika inovasi pelayanan terkait Tugas dan Fungsi PD yang tidak lagi diposisikan sebagai upaya eksperimental atau intervensi sementara, melainkan telah menyatu ke dalam sistem, budaya, dan pola pikir organisasi. Inovasi pada tahap ini tidak diperlakukan sebagai sesuatu yang asing atau tambahan, tetapi</p>	<p>Laporan Realisasi Anggaran Bappeda</p> <p>Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM</p> <p>Laporan Inovasi Bappeda</p>

No.	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>menjadi cara kerja yang wajar dan melekat dalam keseharian. Pada tahap ini, inovasi tersebut juga sudah mendapatkan dukungan regulasi dan kelembagaan. Inovasi yang tersosialisasi serta berkelanjutan Adalah inovasi yang tidak hanya diperkenalkan dan dipahami secara luas oleh para pemangku kepentingan, tetapi juga mampu dipertahankan serta dikembangkan dalam jangka panjang. Tahap tersosialisasi menunjukkan bahwa inovasi telah memperoleh legitimasi sosial melalui proses komunikasi, edukasi, dan partisipasi, sehingga tidak lagi bersifat eksklusif. Sementara itu, tahap berkelanjutan mencerminkan bahwa inovasi tersebut didukung oleh sistem kelembagaan, alokasi sumber daya, serta mekanisme adaptasi yang menjadikannya tetap relevan dan bermanfaat meskipun menghadapi dinamika perubahan.</p>	

No.	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				(Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Bappeda)	

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pengukuran kinerja pada periode 2021-2025 difokuskan pada tiga dimensi utama, yaitu penguatan kualitas pengendalian perencanaan pembangunan daerah, optimalisasi pemanfaatan data dan informasi pembangunan, serta peningkatan implementasi rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan inovasi. Selain indikator pada level sasaran strategis, juga terdapat indikator kinerja lainnya yang mendukung tata kelola internal perangkat daerah, seperti Nilai SAKIP Bappeda, persentase realisasi anggaran, Indeks Profesionalitas ASN, serta jumlah inovasi yang terinternalisasi dan berkelanjutan.

#### B. Indikator Kinerja Utama Periode 2025-2029

Memasuki periode perencanaan 2025-2029, struktur Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Mojokerto mengalami penyesuaian sejalan dengan penguatan arah kebijakan pembangunan daerah. Meskipun terjadi penajaman indikator dan redefinisi sasaran, prinsip dasar pengukuran kinerja tetap diarahkan pada kualitas penyelenggaraan fungsi perencanaan serta penelitian dan pengembangan daerah.

Pada periode ini, IKU ditetapkan pada tiga sasaran strategis perangkat daerah, yaitu peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, peningkatan peran riset dan inovasi dalam pembangunan daerah, serta peningkatan kualitas tata kelola penunjang pencapaian kinerja perangkat daerah. Setiap indikator dirumuskan secara operasional dengan memperhatikan satuan pengukuran, formulasi perhitungan, serta sumber data yang jelas dan terverifikasi.

Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Mojokerto periode 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.2.b Indikator Kinerja Utama 2025-2029

N o	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA																																																																																	
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	Nilai	<p>IPPD berfungsi sebagai instrumen pengukuran kinerja perencanaan daerah melalui empat aspek utama, yaitu kelembagaan perencanaan, proses penyusunan, substansi dokumen, dan inovasi dalam perencanaan. IPPD juga berlandaskan pada lima prinsip utama, yaitu integrasi, partisipasi, konsistensi, berbasis data dan bukti, serta berorientasi pada hasil pembangunan.</p> <p>Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala BAPPENAS Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan, berikut instrumen pengukuran untuk Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>ASPEK/ INDIKATOR/ SUBINDIKATOR</th> <th>BOBOT/ NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A SINERGI</td> <td></td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Keselarasan Dokumen RPJMD dengan RPJMN</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dengan sasaran PN</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>ketersediaan dukungan program daerah untuk kegiatan PN</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>keselarasan indikator makro RPJMD dengan RPJMN</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1.4</td> <td>keselarasan RPJMD dengan proyek prioritas strategis</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1.5</td> <td>keselarasan SPM di RPJMD dengan di RPJMN</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1.6</td> <td>keselarasan target SPM di daerah dengan di nasional</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Keselarasan RKPD dengan RKP</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah di RKPD dengan PN RKP</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>ketersediaan dukungan program daerah di RKPD untuk kegiatan PN RKP</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>keselarasan indikator makro RKPD dengan RKP</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ketersediaan dukungan APBD untuk Program Prioritas Nasional dalam RKPD</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>B KUALITAS PERENCANAAN</td> <td></td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Kesesuaian Isu Strategis, Target, Program/Kegiatan di RPJMD atau RKPD</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>kesesuaian isu strategis dengan kebutuhan daerah</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>kesesuaian target dan sasaran pembangunan dengan isu strategis dan prioritas daerah</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>kesesuaian program/kegiatan dalam mencapai target dan sasaran</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Inovasi Perencanaan Pembangunan</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>keterkaitan permasalahan dengan inovasi yang ada</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>keterkaitan output dengan outcome inovasi</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>proporsi jumlah inovasi terhadap perencanaan pembangunan</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>C KETERHUBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DENGAN PERENCANAAN KINERJA</td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Target dan Sasaran Pemda menjadi Target dan Sasaran PD</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>keterkaitan Pokin dan Cascading Pemda dengan Pokin dan Cascading PD</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL A+B+C</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	NO	ASPEK/ INDIKATOR/ SUBINDIKATOR	BOBOT/ NILAI	A SINERGI		32	1	Keselarasan Dokumen RPJMD dengan RPJMN	9	1.1	keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dengan sasaran PN	2	1.2	ketersediaan dukungan program daerah untuk kegiatan PN	3	1.3	keselarasan indikator makro RPJMD dengan RPJMN	1	1.4	keselarasan RPJMD dengan proyek prioritas strategis	1	1.5	keselarasan SPM di RPJMD dengan di RPJMN	1	1.6	keselarasan target SPM di daerah dengan di nasional	1	2	Keselarasan RKPD dengan RKP	13	2.1	keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah di RKPD dengan PN RKP	2,5	2.2	ketersediaan dukungan program daerah di RKPD untuk kegiatan PN RKP	9	2.3	keselarasan indikator makro RKPD dengan RKP	1,5	3	Ketersediaan dukungan APBD untuk Program Prioritas Nasional dalam RKPD	10	B KUALITAS PERENCANAAN		58	1	Kesesuaian Isu Strategis, Target, Program/Kegiatan di RPJMD atau RKPD	49	1.1	kesesuaian isu strategis dengan kebutuhan daerah	18	1.2	kesesuaian target dan sasaran pembangunan dengan isu strategis dan prioritas daerah	14	1.3	kesesuaian program/kegiatan dalam mencapai target dan sasaran	17	2	Inovasi Perencanaan Pembangunan	9	2.1	keterkaitan permasalahan dengan inovasi yang ada	3	2.2	keterkaitan output dengan outcome inovasi	3	2.3	proporsi jumlah inovasi terhadap perencanaan pembangunan	3	C KETERHUBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DENGAN PERENCANAAN KINERJA		10	1	Target dan Sasaran Pemda menjadi Target dan Sasaran PD	10	1.1	keterkaitan Pokin dan Cascading Pemda dengan Pokin dan Cascading PD	10		TOTAL A+B+C	100	6. RPJMN; 7. RPJMD; 8. Renstra; 9. RKP; 10. RKPD; dan 11. Renja.
NO	ASPEK/ INDIKATOR/ SUBINDIKATOR	BOBOT/ NILAI																																																																																				
A SINERGI		32																																																																																				
1	Keselarasan Dokumen RPJMD dengan RPJMN	9																																																																																				
1.1	keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dengan sasaran PN	2																																																																																				
1.2	ketersediaan dukungan program daerah untuk kegiatan PN	3																																																																																				
1.3	keselarasan indikator makro RPJMD dengan RPJMN	1																																																																																				
1.4	keselarasan RPJMD dengan proyek prioritas strategis	1																																																																																				
1.5	keselarasan SPM di RPJMD dengan di RPJMN	1																																																																																				
1.6	keselarasan target SPM di daerah dengan di nasional	1																																																																																				
2	Keselarasan RKPD dengan RKP	13																																																																																				
2.1	keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah di RKPD dengan PN RKP	2,5																																																																																				
2.2	ketersediaan dukungan program daerah di RKPD untuk kegiatan PN RKP	9																																																																																				
2.3	keselarasan indikator makro RKPD dengan RKP	1,5																																																																																				
3	Ketersediaan dukungan APBD untuk Program Prioritas Nasional dalam RKPD	10																																																																																				
B KUALITAS PERENCANAAN		58																																																																																				
1	Kesesuaian Isu Strategis, Target, Program/Kegiatan di RPJMD atau RKPD	49																																																																																				
1.1	kesesuaian isu strategis dengan kebutuhan daerah	18																																																																																				
1.2	kesesuaian target dan sasaran pembangunan dengan isu strategis dan prioritas daerah	14																																																																																				
1.3	kesesuaian program/kegiatan dalam mencapai target dan sasaran	17																																																																																				
2	Inovasi Perencanaan Pembangunan	9																																																																																				
2.1	keterkaitan permasalahan dengan inovasi yang ada	3																																																																																				
2.2	keterkaitan output dengan outcome inovasi	3																																																																																				
2.3	proporsi jumlah inovasi terhadap perencanaan pembangunan	3																																																																																				
C KETERHUBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DENGAN PERENCANAAN KINERJA		10																																																																																				
1	Target dan Sasaran Pemda menjadi Target dan Sasaran PD	10																																																																																				
1.1	keterkaitan Pokin dan Cascading Pemda dengan Pokin dan Cascading PD	10																																																																																				
	TOTAL A+B+C	100																																																																																				
2.	Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah	Tingkat Adopsi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi	Persentase	Hasil riset dan inovasi berupa Hasil Kajian, Policy Paper, Policy Brief, dan sebagainya yang serupa. Adapun hasil riset dan inovasi tersebut, kemudian menjadi pedoman dalam perumusan dan penetapan kebijakan.	Laporan Pelaksanaan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Bidang Litbang																																																																																	

N o	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				(Jumlah kebijakan/produk perencanaan pembangunan daerah yang dirumuskan berdasarkan hasil riset dan inovasi ÷ Jumlah kebijakan/produk perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan pada tahun berjalan) × 100	
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	<p>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terpadu dalam rangka mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel.</p> <p>Laporan Hasil Evaluasi SAKIP            Ket Nilai SAKIP :            Kategori Sangat Kurang : 0 – 30            Kategori Kurang : 30 – 50            Kategori Cukup : 50 – 60            Kategori Baik : 60 -70            Kategori Sangat Baik : 70 – 80            Kategori Memuaskan : 80 -90            Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100</p>	Laporan Hasil Evaluasi Tim AKIP Pemerintah Daerah

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa pengukuran kinerja Bappeda Kabupaten Mojokerto pada periode 2025-2029 diarahkan secara lebih terstruktur pada kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD), tingkat adopsi kebijakan berbasis riset dan inovasi, serta Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebagai indikator tata kelola internal. Penetapan indikator tersebut mencerminkan penguatan integrasi antara perencanaan, pemanfaatan riset, dan sistem akuntabilitas kinerja dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, keberadaan dua kerangka Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa pengukuran kinerja Bappeda Kabupaten Mojokerto tetap dilaksanakan secara konsisten meskipun terjadi transisi periode perencanaan. Kesinambungan tersebut memastikan bahwa capaian kinerja yang dilaporkan pada Bab III tetap memiliki landasan pengukuran yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **2.3 Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen komitmen kinerja tahunan yang disusun sebagai tindak lanjut dari penjenjangan strategis dan indikator kinerja utama sebagaimana diuraikan pada subbab sebelumnya. Dokumen ini memuat kesepakatan antara atasan langsung dengan pimpinan perangkat daerah atas target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran, sebagai bentuk pengikatan formal antara perencanaan kinerja dengan pelaksanaan serta pengendaliannya. Dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja menjadi dasar utama dalam pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja perangkat daerah. Sejalan dengan dinamika periode perencanaan pada Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Mojokerto disusun dengan merujuk pada dua dokumen perencanaan, yaitu periode 2021-2025 dan periode 2025-2029. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa Tahun 2025 merupakan tahun transisi, sehingga pengikatan komitmen kinerja tetap menjaga kesinambungan antara akhir periode sebelumnya dan awal periode perencanaan yang baru.

#### **A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025**

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025 memuat sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah, beserta indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk tahun berjalan. Selain itu, ditetapkan pula indikator kinerja lainnya yang mendukung tata kelola internal perangkat daerah.

Komitmen kinerja tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3.a Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1	Persentase Kinerja Pengendalian perencanaan Pembangunan daerah	100%
		1.2	Persentase Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	100%
		1.3	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Daerah	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		yang dijalankan Perangkat Daerah		

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 (A)
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90,5%
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	85,90 (Tinggi)
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		2 Inovasi

Tabel tersebut menunjukkan bahwa seluruh indikator pada sasaran strategis ditargetkan mencapai 100 persen, yang mencerminkan fokus pada optimalisasi pengendalian perencanaan, pemanfaatan data dan informasi pembangunan, serta implementasi rekomendasi kebijakan. Pada kinerja lainnya, ditetapkan target Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 84 (predikat A), persentase realisasi anggaran sebesar 90,5 persen, Indeks Profesionalitas ASN sebesar 85,90 (kategori tinggi), serta dua inovasi yang terinternalisasi dan berkelanjutan.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, dialokasikan anggaran melalui program-program Bappeda sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.3.a Anggaran Per Program

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 7.228.710.500	APBD 2025
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 1.339.109.308	APBD 2025
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 2.698.130.787	APBD 2025
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 355.499.000	APBD 2025

Alokasi anggaran tersebut menunjukkan keterkaitan antara target kinerja dan dukungan sumber daya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 sebelum perubahan. Struktur program yang digunakan konsisten dengan fungsi perencanaan, pengendalian, serta penelitian dan pengembangan daerah.

## **B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029**

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2024, Perjanjian Kinerja dapat mengalami perubahan apabila terjadi perubahan pejabat, perubahan perencanaan strategis, atau perubahan prioritas yang berdampak signifikan terhadap pencapaian sasaran. Dalam konteks Bappeda Kabupaten Mojokerto, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengalami penyesuaian setelah ditetapkannya dokumen perencanaan periode 2025-2029.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 disepakati dan ditandatangani oleh Bupati Mojokerto selaku atasan langsung dengan Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto sebagai bentuk komitmen bersama atas pencapaian sasaran strategis perangkat daerah pada kerangka perencanaan baru.

Komitmen kinerja tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.3.b Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	IPPD (Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah)	79,70
2	Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah	Tingkat Adopsi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi	58,30
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	84

Pada periode ini, sasaran strategis Bappeda diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD), peningkatan peran riset dan inovasi melalui tingkat adopsi kebijakan berbasis riset dan inovasi, serta penguatan tata kelola penunjang melalui Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, alokasi anggaran per program pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut. Penyajian anggaran per program ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai dukungan pendanaan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kinerja.

Tabel 2.3.b Anggaran Per Program

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 8.184.922.304	PAPBD 2025
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 1.207.519.708	PAPBD 2025
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 2.784.522.738	PAPBD 2025
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 598.675.850	PAPBD 2025

Alokasi anggaran pada Perubahan APBD menunjukkan adanya penyesuaian dukungan sumber daya terhadap kerangka sasaran dan indikator pada periode perencanaan 2025-2029, tanpa mengubah struktur program utama perangkat daerah.

Dengan ditetapkannya Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 beserta dukungan anggarannya, kedua dokumen tersebut menjadi dasar pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja Bappeda Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya, capaian atas target kinerja dan realisasi anggaran tersebut akan diuraikan dan dianalisis secara lebih mendalam pada Bab III Akuntabilitas Kinerja.

### **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini disusun untuk menyajikan gambaran mengenai akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto selama Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Akuntabilitas kinerja dipahami sebagai kemampuan perangkat daerah dalam menunjukkan keterkaitan antara target yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta hasil kinerja yang dicapai secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai kelanjutan dari perencanaan kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penyajian akuntabilitas kinerja pada bab ini difokuskan pada hasil pengukuran dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama serta target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dengan demikian, bab ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari satu rangkaian siklus manajemen kinerja yang dimulai dari perencanaan, dilanjutkan dengan pelaksanaan, dan ditutup dengan pengukuran serta evaluasi kinerja.

Penyajian akuntabilitas kinerja dalam bab ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengukuran kinerja, analisis atas capaian yang diperoleh, hingga penjelasan mengenai prestasi kinerja lainnya dan akuntabilitas anggaran. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai kinerja Bappeda Kabupaten Mojokerto, tidak hanya dari sisi pencapaian indikator, tetapi juga dari sisi proses, pembelajaran, dan dukungan sumber daya yang mempengaruhi kinerja tersebut.

Melalui Bab Akuntabilitas Kinerja ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang objektif mengenai sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Mojokerto—baik dalam perencanaan pembangunan daerah maupun penelitian dan pengembangan daerah—telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran kinerja yang ditetapkan. Uraian pada bab ini sekaligus menjadi dasar dalam mengidentifikasi pembelajaran dan ruang perbaikan sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja pada periode perencanaan berikutnya.

### **3.1 Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja pada subbab ini disajikan sebagai tahap awal dalam pembacaan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menunjukkan tingkat ketercapaian target kinerja tahunan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagai dasar objektif dalam menilai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Sejalan dengan karakter LKjIP sebagai laporan kinerja tahunan, pengukuran kinerja difokuskan pada perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada akhir tahun anggaran. Penyajian pengukuran kinerja pada subbab ini belum memuat analisis atas faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja, melainkan dibatasi pada penyajian hasil pengukuran secara faktual dan terukur sesuai indikator yang telah ditetapkan. Dalam konteks Tahun 2025 yang merupakan tahun transisi perencanaan, pengukuran kinerja pada bagian awal subbab ini masih merujuk pada indikator dan target yang bersumber dari dokumen perencanaan periode 2021-2025. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pelaporan kinerja serta memberikan gambaran yang utuh mengenai capaian kinerja pada akhir periode perencanaan sebelumnya sebelum dilakukan penyesuaian terhadap kerangka perencanaan periode 2025-2029.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang berpedoman pada dokumen perencanaan periode 2021-2025, terdapat dua kelompok kinerja yang diperjanjikan. Kelompok pertama adalah kinerja utama yang bersumber dari sasaran strategis dalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Kelompok kedua adalah kinerja lainnya yang merupakan penugasan dari Bupati Mojokerto selaku atasan langsung Kepala Perangkat Daerah, yang meliputi Nilai SAKIP Perangkat Daerah, realisasi anggaran perangkat daerah, Indeks Profesionalitas ASN, serta inovasi perangkat daerah.

Pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan kinerja periode perencanaan 2021-2025 adalah sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100 persen sebanyak 2 indikator, yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan realisasi anggaran;
2. Capaian realisasi tepat 100 persen sebanyak 4 indikator, yang terdiri atas 3 Indikator Kinerja Utama dan indikator lainnya berupa inovasi perangkat daerah;
3. Capaian realisasi di bawah 100 persen sebanyak 1 indikator, yaitu Indeks Profesionalitas ASN.

Berdasarkan pengukuran tersebut, capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025 selanjutnya disajikan secara rinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.1 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1	Persentase Kinerja Pengendalian perencanaan Pembangunan daerah	100%	100%	100%
		1.2	Persentase Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%
		1.3	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Daerah yang dijalankan Perangkat Daerah	100%	100%	100%

NO.	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 (A)	85,09 (A)	101,30%
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90,50%	93,64%	103,47%
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	85,90	84,01	97,80%
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		2 Inovasi	2 Inovasi	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel tersebut, indikator yang belum mencapai target adalah Indeks Profesionalitas ASN. Tidak tercapainya indikator ini terutama dipengaruhi oleh perubahan mekanisme penyampaian sertifikat peningkatan kompetensi individu ASN, yang sebelumnya dilakukan secara manual dan pada Tahun 2025 beralih ke mekanisme unggah melalui sistem berbasis laman. Pada masa transisi tersebut, masih terdapat kendala teknis berupa gangguan pada sistem yang

berdampak pada keterlambatan dan ketidaklengkapan data sertifikat peningkatan kompetensi ASN individu. Kondisi ini berpengaruh terhadap nilai IP ASN individu, yang selanjutnya berdampak pada nilai IP ASN perangkat daerah sebagai nilai komposit. Seiring dengan ditetapkannya dokumen perencanaan periode 2025-2029, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 juga mengalami penyesuaian melalui Perjanjian Kinerja Perubahan. Oleh karena itu, pada bagian selanjutnya akan disajikan pengukuran realisasi kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan kerangka perencanaan periode 2025-2029, sebagai dasar pelaporan kinerja pada fase awal periode perencanaan yang baru.

Seiring dengan ditetapkannya dokumen perencanaan periode 2025-2029, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengalami penyesuaian melalui Perjanjian Kinerja Perubahan. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk menyelaraskan target dan indikator kinerja perangkat daerah dengan arah kebijakan serta sasaran strategis pada periode perencanaan yang baru. Oleh karena itu, pengukuran kinerja pada bagian ini disajikan berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai representasi capaian kinerja pada fase awal periode perencanaan 2025-2029.

Pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai dengan kinerja periode perencanaan 2025-2029 dapat diringkas sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100 persen sebanyak 3 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100 persen sebanyak 0 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100 persen sebanyak 0 indikator.

Berdasarkan ringkasan tersebut, capaian Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 selanjutnya disajikan secara rinci dalam Tabel berikut.

Tabel 3.1.2 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI PER TRIWULAN				REALISASI 2025	CAPAIAN
				I	II	III	IV		
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	IPPD (Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah)	79,70	-	-	-	85,87	85,87	107,74%
2	Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah	Tingkat Adopsi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi	58,30	-	-	-	66,67	66,67	114,36%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI PER TRIWULAN				REALISASI 2025	CAPAIAN
				I	II	III	IV		
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	84,00 (A)	-	-	85,09 (A)	-	85,09 (A)	101,30%

Hasil pengukuran kinerja pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh indikator kinerja mencapai realisasi di atas target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan kesesuaian antara target kinerja dengan pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Mojokerto pada awal periode perencanaan 2025–2029, serta menunjukkan kesiapan perangkat daerah dalam mengimplementasikan arah kebijakan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Secara normatif, capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa penyesuaian indikator dan target pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 telah dilakukan secara realistik dan terukur, sehingga mampu menggambarkan kinerja perangkat daerah secara lebih proporsional. Namun demikian, capaian ini tetap perlu dibaca sebagai hasil pengukuran kinerja tahunan yang akan dianalisis lebih lanjut pada subbab berikutnya untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi capaian tersebut secara lebih komprehensif.

Secara keseluruhan, pengukuran kinerja Tahun 2025 yang disajikan pada Subbab 3.1 menunjukkan capaian kinerja Bappeda Kabupaten Mojokerto melalui dua kerangka perencanaan, yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan periode 2021-2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang disesuaikan dengan dokumen perencanaan periode 2025-2029. Pada kerangka perencanaan periode 2021-2025, sebagian besar indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan, meskipun masih terdapat satu indikator yang belum tercapai. Sementara itu, pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 seluruh indikator kinerja menunjukkan capaian di atas target. Penyajian dua kerangka pengukuran ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai capaian kinerja Tahun 2025 dalam konteks transisi perencanaan. Selanjutnya, hasil pengukuran kinerja tersebut akan dianalisis secara lebih mendalam pada Subbab 3.2 Analisis Kinerja untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi capaian

kinerja serta pembelajaran yang dapat digunakan dalam peningkatan kinerja ke depan.

### **3.2 Analisis Kinerja**

Subbab ini disusun untuk memberikan analisis atas capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah disajikan pada subbab sebelumnya. Analisis kinerja difokuskan pada pembacaan capaian kinerja per indikator sebagai dasar untuk memahami makna di balik angka realisasi yang dicapai.

Analisis kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap capaian kinerja pada tahun sebelumnya, tren beberapa tahun terakhir, serta target akhir yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Selain itu, analisis juga mencakup identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja, baik yang mendorong keberhasilan maupun yang menjadi kendala, termasuk keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.

Melalui analisis kinerja ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai efektivitas pencapaian sasaran kinerja, tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta pembelajaran yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tindak lanjut pada periode berikutnya. Analisis yang disajikan pada subbab ini dimaksudkan sebagai bahan refleksi kinerja yang bersifat konstruktif dan terkendali dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan kinerja Bappeda Kabupaten Mojokerto ke depan.

#### **3.2.1. Gambaran per Indikator (definisi operasional, formulasi, sumber data)**

Pada Tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto melaksanakan dua kerangka Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan periode 2021-2025 dan APBD Tahun 2025, serta Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun setelah ditetapkannya dokumen perencanaan periode 2025-2029 dan Perubahan APBD Tahun 2025. Keberadaan dua Perjanjian Kinerja tersebut mencerminkan kondisi transisi perencanaan yang memerlukan pembacaan kinerja secara berlapis agar kesinambungan dan arah kebijakan tetap terjaga.

## A. Analisis Perjanjian Kinerja sesuai Dokumen Perencanaan 2021-2025 dan APBD Tahun 2025

Perjanjian Kinerja yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan periode 2021-2025 dan APBD Tahun 2025 memuat satu sasaran strategis utama dan kinerja lainnya yang bersifat penugasan. Sasaran strategis yang diperjanjikan adalah meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah, yang diukur melalui tiga indikator kinerja utama. Selain itu, terdapat kinerja lainnya yang mendukung pencapaian tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel dengan empat indikator kinerja.

Adapun indikator kinerja dan target realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan periode 2021-2025 disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 3.2.1.a Perjanjian Kinerja Tahun 2025**  
**(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kinerja Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	(Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan + Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah) / 2  3. Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan diukur dari: f. Keselarasan Dokrenda Kabupaten Mojokerto terhadap Dokrenda Provinsi dan Dokren Pemerintah Pusat (aspek prioritas, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan, penyajian substansi, program, indikator serta target); g. Keselarasan RKPD terhadap RPJMD (aspek prioritas pembangunan yang ditetapkan, penyajian substansi, program, indikator serta target); h. Keselarasan Renstra terhadap RPJMD (aspek prioritas, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan, penyajian substansi,	1. RPJMD; 2. Renstra; 3. RKPD; 4. Renja; dan 5. Laporan Pelaksanaan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Bidang Rendalev, PPM, dan PSDAIW

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			<p>program, indikator serta target);</p> <p>i. Keselarasan Renja terhadap Renstra (aspek prioritas Perangkat Daerah yang ditetapkan, penyajian substansi, program, kegiatan, subkegiatan, indikator serta target); dan</p> <p>j. Keselarasan Renja terhadap RKPD (aspek prioritas pembangunan yang ditetapkan, penyajian substansi, program, indikator serta target).</p> <p>4. Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah diukur dari:</p> <p>b. Pencapaian Target Perencanaan Pembangunan yang sudah ditetapkan pada RKPD tahun berjalan.</p>	
	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	(Jumlah dataset yang disepakati Perangkat Daerah pada Berita Acara Forum Satu Data Palapa dibagi Jumlah OPD yang memanfaatkan data tersebut) x 100%	Berita Acara Forum Satu Data Palapa Bappeda	
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Daerah yang dijalankan Perangkat Daerah	<p>Rekomendasi Kebijakan yang diberikan merupakan Hasil dari Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi berupa Hasil Kajian, Policy Paper, Policy Brief, dan sebagainya yang serupa.</p> <p>Pengukuran Indikator Kinerjanya : (Jumlah hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang dijalankan oleh Perangkat Daerah terkait dibagi Jumlah hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi terkait isu strategis pembangunan daerah pada tahun berjalan) x 100%</p>	Laporan Pelaksanaan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Bidang Litbang	

No.	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai SAKIP Bappeda	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Ket Nilai SAKIP : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat
		Percentase Realisasi Anggaran Bappeda	(Realisasi Anggaran / Pagu Anggaran) x 100%	Laporan Realisasi Anggaran Bappeda
		Indeks Profesionalitas ASN Bappeda	Ket IP ASN : Kategori Sangat Rendah : <= 60 Kategori Rendah : 61 – 70 Kategori Sedang : 71 – 80 Kategori Tinggi : 81 – 90 Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100	Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM
2.	Optimalnya Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Bappeda	Inovasi yang terinternalisasi Adalah Ketika inovasi pelayanan terkait Tugas dan Fungsi PD yang tidak lagi diposisikan sebagai upaya eksperimental atau intervensi sementara, melainkan telah menyatu ke dalam sistem, budaya, dan pola pikir organisasi. Inovasi pada tahap ini tidak diperlakukan sebagai sesuatu yang asing atau tambahan, tetapi menjadi cara kerja yang wajar dan melekat dalam keseharian. Pada tahap ini, inovasi tersebut juga sudah mendapatkan dukungan regulasi dan kelembagaan. Inovasi yang tersosialisasi serta berkelanjutan Adalah inovasi yang tidak hanya diperkenalkan dan dipahami secara luas oleh para pemangku kepentingan, tetapi juga mampu dipertahankan serta dikembangkan dalam jangka panjang. Tahap tersosialisasi menunjukkan bahwa inovasi telah memperoleh legitimasi sosial melalui	Laporan Inovasi Bappeda

No.	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			<p>proses komunikasi, edukasi, dan partisipasi, sehingga tidak lagi bersifat eksklusif. Sementara itu, tahap berkelanjutan mencerminkan bahwa inovasi tersebut didukung oleh sistem kelembagaan, alokasi sumber daya, serta mekanisme adaptasi yang menjadikannya tetap relevan dan bermanfaat meskipun menghadapi dinamika perubahan.</p> <p>(Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Bappeda)</p>	

Berdasarkan tabel tersebut, indikator kinerja utama dirancang untuk menggambarkan kualitas perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh. Indikator Persentase Kinerja Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah diukur melalui rata-rata persentase keselarasan dokumen perencanaan dan persentase capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah. Keselarasan dokumen perencanaan mencerminkan konsistensi antara dokumen perencanaan pusat, provinsi, dan daerah, serta keterpaduan antar dokumen perencanaan daerah. Sementara itu, capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah menggambarkan tingkat keterlaksanaan target perencanaan yang ditetapkan dalam RKPD tahun berjalan.

Indikator Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan data perencanaan oleh perangkat daerah melalui mekanisme satu data daerah. Selanjutnya, indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Daerah yang dijalankan Perangkat Daerah menggambarkan tingkat pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah. Selain indikator kinerja utama tersebut, tabel juga memuat indikator kinerja lainnya yang bersifat penugasan, yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah, realisasi anggaran, Indeks Profesionalitas ASN, serta inovasi perangkat daerah, yang berfungsi sebagai penguat tata kelola internal perangkat daerah.

## **B. Analisis Perubahan Perjanjian Kinerja sesuai Dokumen Perencanaan 2025-2029 dan Perubahan APBD Tahun 2025**

Seiring dengan ditetapkannya dokumen perencanaan periode 2025–2029, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengalami penyesuaian melalui Perjanjian Kinerja Perubahan. Pada kerangka ini, sasaran strategis yang diperjanjikan bertambah menjadi tiga sasaran utama, yaitu meningkatnya kualitas perencanaan, meningkatnya peran riset dan inovasi dalam pembangunan daerah, serta meningkatnya kualitas tata kelola penunjang pencapaian kinerja perangkat daerah. Sasaran terakhir diposisikan sebagai sasaran pendukung yang memperkuat pencapaian kinerja utama.

Adapun indikator kinerja dan target Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan periode 2025-2029 disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 3.2.1.b Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

N o	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	Nilai	IPPD berfungsi sebagai instrumen pengukuran kinerja perencanaan daerah melalui empat aspek utama, yaitu kelembagaan perencanaan, proses penyusunan, substansi dokumen, dan inovasi dalam perencanaan. IPPD juga berlandaskan pada lima prinsip utama, yaitu integrasi, partisipasi, konsistensi, berbasis data dan bukti, serta berorientasi	1. RPJMN; 2.RPJMD; 3.Renstra; 4.RKP; 5.RKPD; dan 6.Renja.

N o	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA																																																																																																		
				<p>pada hasil pembangunan. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala BAPPENAS Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan, berikut instrumen pengukuran untuk Indeks Perencanaan Pembangunan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th><th>ASPEK/ INDIKATOR/ SUBINDIKATOR</th><th>BOB NILAI</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td><b>SINERGI</b></td><td>32</td></tr> <tr> <td>1</td><td><b>Keselarasan Dokumen RPJMD dengan RPJMN</b></td><td>9</td></tr> <tr> <td>1.1</td><td>keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dengan sasaran PN</td><td>2</td></tr> <tr> <td>1.2</td><td>ketersediaan dukungan program daerah untuk kegiatan PN</td><td>3</td></tr> <tr> <td>1.3</td><td>keselarasan indikator makro RPJMD dengan RPJMN</td><td>1</td></tr> <tr> <td>1.4</td><td>keselarasan RPJMD dengan proyek prioritas strategis</td><td>1</td></tr> <tr> <td>1.5</td><td>keselarasan SPM di RPJMD dengan di RPJMN</td><td>1</td></tr> <tr> <td>1.6</td><td>keselarasan target SPM di daerah dengan di nasional</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td><b>Keselarasan RKPD dengan RKP</b></td><td>13</td></tr> <tr> <td>2.1</td><td>keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah di RKPD dengan PN RKP</td><td>2,</td></tr> <tr> <td>2.2</td><td>ketersediaan dukungan program daerah di RKPD untuk kegiatan PN RKP</td><td>9</td></tr> <tr> <td>2.3</td><td>keselarasan indikator makro RKPD dengan RKP</td><td>1,</td></tr> <tr> <td>3</td><td><b>Ketersediaan dukungan APBD untuk Program Prioritas Nasional dalam RKPD</b></td><td>10</td></tr> <tr> <td>B</td><td><b>KUALITAS PERENCANAAN</b></td><td>58</td></tr> <tr> <td>1</td><td><b>Kesesuaian Isu Strategis, Target, Program/Kegiatan di RPJMD atau RKPD</b></td><td>49</td></tr> <tr> <td>1.1</td><td>kesesuaian isu strategis dengan kebutuhan daerah</td><td>18</td></tr> <tr> <td>1.2</td><td>kesesuaian target dan sasaran pembangunan dengan isu strategis dan prioritas daerah</td><td>14</td></tr> <tr> <td>1.3</td><td>kesesuaian program/kegiatan dalam mencapai target dan sasaran</td><td>17</td></tr> <tr> <td>2</td><td><b>Inovasi Perencanaan Pembangunan</b></td><td>9</td></tr> <tr> <td>2.1</td><td>keterkaitan permasalahan dengan inovasi yang ada</td><td>3</td></tr> <tr> <td>2.2</td><td>keterkaitan output dengan outcome inovasi</td><td>3</td></tr> <tr> <td>2.3</td><td>proporsi jumlah inovasi terhadap perencanaan pembangunan</td><td>3</td></tr> <tr> <td>C</td><td><b>KETERHUBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DENGAN PERENCANAAN KINERJA</b></td><td>10</td></tr> <tr> <td>1</td><td><b>Target dan Sasaran Pemda menjadi Target dan Sasaran PD</b></td><td>10</td></tr> <tr> <td>1.1</td><td>keterkaitan Pokin dan Cascading Pemda dengan Pokin dan Cascading PD</td><td>10</td></tr> <tr> <td></td><td><b>TOTAL A+B+C</b></td><td>100</td></tr> <tr> <td></td><td>Daerah:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah</td><td>Tingkat Adopsi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi</td><td>Persentase</td><td> <p>Hasil riset dan inovasi berupa Hasil Kajian, Policy Paper, Policy Brief, dan sebagainya yang serupa. Adapun hasil riset dan inovasi tersebut, kemudian menjadi pedoman dalam perumusan dan penetapan kebijakan.</p> <p>(Jumlah kebijakan/produk perencanaan pembangunan daerah yang dirumuskan berdasarkan hasil riset dan inovasi ÷ Jumlah kebijakan/produk perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan pada tahun berjalan) × 100</p> </td><td>Laporan Pelaksanaan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Bidang Litbang</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah</td><td>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</td><td>Nilai</td><td> <p>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terpadu dalam rangka mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel.</p> <p>Laporan Hasil Evaluasi SAKIP</p> </td><td>Laporan Hasil Evaluasi Tim AKIP Pemerintah Daerah</td></tr> </tbody> </table>	NO	ASPEK/ INDIKATOR/ SUBINDIKATOR	BOB NILAI	A	<b>SINERGI</b>	32	1	<b>Keselarasan Dokumen RPJMD dengan RPJMN</b>	9	1.1	keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dengan sasaran PN	2	1.2	ketersediaan dukungan program daerah untuk kegiatan PN	3	1.3	keselarasan indikator makro RPJMD dengan RPJMN	1	1.4	keselarasan RPJMD dengan proyek prioritas strategis	1	1.5	keselarasan SPM di RPJMD dengan di RPJMN	1	1.6	keselarasan target SPM di daerah dengan di nasional	1	2	<b>Keselarasan RKPD dengan RKP</b>	13	2.1	keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah di RKPD dengan PN RKP	2,	2.2	ketersediaan dukungan program daerah di RKPD untuk kegiatan PN RKP	9	2.3	keselarasan indikator makro RKPD dengan RKP	1,	3	<b>Ketersediaan dukungan APBD untuk Program Prioritas Nasional dalam RKPD</b>	10	B	<b>KUALITAS PERENCANAAN</b>	58	1	<b>Kesesuaian Isu Strategis, Target, Program/Kegiatan di RPJMD atau RKPD</b>	49	1.1	kesesuaian isu strategis dengan kebutuhan daerah	18	1.2	kesesuaian target dan sasaran pembangunan dengan isu strategis dan prioritas daerah	14	1.3	kesesuaian program/kegiatan dalam mencapai target dan sasaran	17	2	<b>Inovasi Perencanaan Pembangunan</b>	9	2.1	keterkaitan permasalahan dengan inovasi yang ada	3	2.2	keterkaitan output dengan outcome inovasi	3	2.3	proporsi jumlah inovasi terhadap perencanaan pembangunan	3	C	<b>KETERHUBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DENGAN PERENCANAAN KINERJA</b>	10	1	<b>Target dan Sasaran Pemda menjadi Target dan Sasaran PD</b>	10	1.1	keterkaitan Pokin dan Cascading Pemda dengan Pokin dan Cascading PD	10		<b>TOTAL A+B+C</b>	100		Daerah:					2.	Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah	Tingkat Adopsi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi	Persentase	<p>Hasil riset dan inovasi berupa Hasil Kajian, Policy Paper, Policy Brief, dan sebagainya yang serupa. Adapun hasil riset dan inovasi tersebut, kemudian menjadi pedoman dalam perumusan dan penetapan kebijakan.</p> <p>(Jumlah kebijakan/produk perencanaan pembangunan daerah yang dirumuskan berdasarkan hasil riset dan inovasi ÷ Jumlah kebijakan/produk perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan pada tahun berjalan) × 100</p>	Laporan Pelaksanaan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Bidang Litbang	3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	<p>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terpadu dalam rangka mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel.</p> <p>Laporan Hasil Evaluasi SAKIP</p>	Laporan Hasil Evaluasi Tim AKIP Pemerintah Daerah
NO	ASPEK/ INDIKATOR/ SUBINDIKATOR	BOB NILAI																																																																																																					
A	<b>SINERGI</b>	32																																																																																																					
1	<b>Keselarasan Dokumen RPJMD dengan RPJMN</b>	9																																																																																																					
1.1	keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dengan sasaran PN	2																																																																																																					
1.2	ketersediaan dukungan program daerah untuk kegiatan PN	3																																																																																																					
1.3	keselarasan indikator makro RPJMD dengan RPJMN	1																																																																																																					
1.4	keselarasan RPJMD dengan proyek prioritas strategis	1																																																																																																					
1.5	keselarasan SPM di RPJMD dengan di RPJMN	1																																																																																																					
1.6	keselarasan target SPM di daerah dengan di nasional	1																																																																																																					
2	<b>Keselarasan RKPD dengan RKP</b>	13																																																																																																					
2.1	keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah di RKPD dengan PN RKP	2,																																																																																																					
2.2	ketersediaan dukungan program daerah di RKPD untuk kegiatan PN RKP	9																																																																																																					
2.3	keselarasan indikator makro RKPD dengan RKP	1,																																																																																																					
3	<b>Ketersediaan dukungan APBD untuk Program Prioritas Nasional dalam RKPD</b>	10																																																																																																					
B	<b>KUALITAS PERENCANAAN</b>	58																																																																																																					
1	<b>Kesesuaian Isu Strategis, Target, Program/Kegiatan di RPJMD atau RKPD</b>	49																																																																																																					
1.1	kesesuaian isu strategis dengan kebutuhan daerah	18																																																																																																					
1.2	kesesuaian target dan sasaran pembangunan dengan isu strategis dan prioritas daerah	14																																																																																																					
1.3	kesesuaian program/kegiatan dalam mencapai target dan sasaran	17																																																																																																					
2	<b>Inovasi Perencanaan Pembangunan</b>	9																																																																																																					
2.1	keterkaitan permasalahan dengan inovasi yang ada	3																																																																																																					
2.2	keterkaitan output dengan outcome inovasi	3																																																																																																					
2.3	proporsi jumlah inovasi terhadap perencanaan pembangunan	3																																																																																																					
C	<b>KETERHUBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DENGAN PERENCANAAN KINERJA</b>	10																																																																																																					
1	<b>Target dan Sasaran Pemda menjadi Target dan Sasaran PD</b>	10																																																																																																					
1.1	keterkaitan Pokin dan Cascading Pemda dengan Pokin dan Cascading PD	10																																																																																																					
	<b>TOTAL A+B+C</b>	100																																																																																																					
	Daerah:																																																																																																						
2.	Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah	Tingkat Adopsi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi	Persentase	<p>Hasil riset dan inovasi berupa Hasil Kajian, Policy Paper, Policy Brief, dan sebagainya yang serupa. Adapun hasil riset dan inovasi tersebut, kemudian menjadi pedoman dalam perumusan dan penetapan kebijakan.</p> <p>(Jumlah kebijakan/produk perencanaan pembangunan daerah yang dirumuskan berdasarkan hasil riset dan inovasi ÷ Jumlah kebijakan/produk perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan pada tahun berjalan) × 100</p>	Laporan Pelaksanaan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Bidang Litbang																																																																																																		
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	<p>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terpadu dalam rangka mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel.</p> <p>Laporan Hasil Evaluasi SAKIP</p>	Laporan Hasil Evaluasi Tim AKIP Pemerintah Daerah																																																																																																		

N o	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				Ket Nilai SAKIP : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	

Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan diukur menggunakan Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD), yang berfungsi sebagai instrumen pengukuran kinerja perencanaan daerah berdasarkan aspek kelembagaan, proses penyusunan, substansi dokumen, dan inovasi dalam perencanaan. IPPD disusun berdasarkan prinsip integrasi, partisipasi, konsistensi, berbasis data dan bukti, serta berorientasi pada hasil pembangunan, dengan instrumen pengukuran yang merujuk pada dokumen perencanaan utama seperti RPJMN, RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja.

Sasaran meningkatnya peran riset dan inovasi dalam pembangunan daerah diukur melalui indikator Tingkat Adopsi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi. Indikator ini menggambarkan proporsi kebijakan dan produk perencanaan pembangunan daerah yang dirumuskan berdasarkan hasil kajian, penelitian, dan inovasi yang dihasilkan oleh Bappeda. Dengan indikator ini, fungsi penelitian dan pengembangan tidak hanya diukur dari jumlah output kajian, tetapi dari tingkat pemanfaatannya dalam proses pengambilan kebijakan.

Adapun sasaran meningkatnya kualitas tata kelola penunjang pencapaian kinerja perangkat daerah diukur menggunakan Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Indikator ini mencerminkan kualitas integrasi antara perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja dalam satu sistem akuntabilitas yang utuh, serta berperan sebagai penguatan kinerja utama Bappeda dalam menjalankan fungsi perencanaan dan penelitian pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan periode 2021-2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang disesuaikan dengan dokumen perencanaan periode 2025-2029 menunjukkan adanya pergeseran fokus kinerja yang lebih tajam dan terstruktur. Kerangka perencanaan sebelumnya menekankan penguatan kinerja perencanaan

dan tata kelola internal, sementara kerangka perencanaan baru memperluas fokus kinerja dengan menempatkan riset dan inovasi sebagai sasaran strategis yang berdiri sendiri dan terukur. Pergeseran ini mencerminkan upaya penyempurnaan kerangka kinerja agar lebih relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah dan arah kebijakan nasional.

Sebagai tindak lanjut dari analisis ini, pembahasan selanjutnya akan diarahkan pada perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya serta tren beberapa tahun terakhir. Perbandingan tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran dinamika kinerja Bappeda Kabupaten Mojokerto secara lebih komprehensif dan menjadi dasar dalam merumuskan langkah perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

### **3.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Sebagai kelanjutan dari analisis perjanjian dan indikator kinerja pada subbab sebelumnya, subbab ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sebagai bagian dari pembacaan dinamika kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto. Perbandingan ini dimaksudkan untuk menempatkan capaian kinerja Tahun 2025 dalam konteks perkembangan kinerja dari waktu ke waktu.

Penyajian perbandingan kinerja pada subbab ini difokuskan pada pembacaan pola capaian kinerja tanpa memasuki analisis faktor penyebab maupun pembahasan efektivitas program dan kegiatan. Dengan pendekatan tersebut, subbab ini menjadi penghubung antara uraian kerangka kinerja pada subbab sebelumnya dan analisis lanjutan yang akan disajikan pada subbab berikutnya.

#### **A. Perbandingan Realisasi Kinerja pada Level Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

Perbandingan realisasi kinerja pada subbagian ini disajikan untuk membaca arah pergerakan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto dari waktu ke waktu. Pembacaan dilakukan dengan membandingkan realisasi Tahun 2025 terhadap capaian tahun sebelumnya serta tren beberapa tahun terakhir, baik dalam konteks akhir dokumen perencanaan periode 2021-2025 maupun posisi awal dokumen perencanaan periode 2025-2029.

Perbandingan realisasi kinerja indikator kinerja utama dan kinerja lainnya yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan periode 2021-2025 disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 3.2.2.a Perbandingan Realisasi Kinerja sesuai Dokumen Perencanaan 2021-2025 dan APBD Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1	Persentase Kinerja Pengendalian perencanaan Pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%
		1.2	Persentase Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%
		1.3	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Daerah yang dijalankan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%

No	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja	Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,06 (A)	79,60 (BB)	82,62 (A)	83,90 (A)
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	88,02%	87,26%	90,27%	90,36%
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	83,03	83,03	89,89	85,61
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 Inovasi	3 Inovasi	1 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi kinerja pada sasaran strategis meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah menunjukkan pola yang konsisten sepanjang periode 2021-2025. Ketiga indikator kinerja utama yang digunakan untuk

mengukur sasaran tersebut mencatat capaian realisasi yang stabil dari tahun ke tahun dan tetap berada pada tingkat yang sama hingga Tahun 2025.

Pada kelompok kinerja lainnya, perbandingan lintas tahun menunjukkan pola yang beragam. Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan persentase realisasi anggaran memperlihatkan kecenderungan meningkat dalam beberapa tahun terakhir hingga Tahun 2025. Sementara itu, Indeks Profesionalitas ASN menunjukkan fluktiasi capaian antar tahun. Adapun indikator Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan menunjukkan variasi realisasi yang sejalan dengan penetapan target tahunan pada masing-masing tahun, sehingga perubahannya tidak dapat dibaca sebagai penurunan kinerja secara langsung.

Selanjutnya, seiring dengan ditetapkannya dokumen perencanaan periode 2025-2029, perbandingan realisasi kinerja juga dibaca dalam konteks posisi awal periode perencanaan yang baru. Perbandingan realisasi indikator kinerja utama pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.2.2.b Perbandingan Realisasi Kinerja sesuai Dokumen Perencanaan 2025-2029 dan Perubahan APBD Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi	
			2024	2025
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	IPPD (Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah)	79,40	85,87
2	Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah	Tingkat Adopsi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi	58,07	66,67
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	83,90 (A)	85,09 (A)

Berdasarkan tabel tersebut, capaian indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) menunjukkan peningkatan pada Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024. Pola peningkatan juga terlihat pada indikator Tingkat Adopsi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi, yang mencerminkan adanya pergerakan positif pada fase awal implementasi kerangka perencanaan 2025-2029. Sementara itu, indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah tetap berada pada kategori yang sama dengan kecenderungan menguat dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Secara umum, perbandingan realisasi kinerja pada level sasaran strategis dan indikator kinerja utama menunjukkan adanya kesinambungan capaian kinerja pada akhir periode perencanaan 2021-2025 serta penguatan capaian awal pada periode

perencanaan 2025-2029. Pola pergerakan kinerja tersebut menjadi dasar untuk pembacaan lebih lanjut mengenai posisi capaian kinerja terhadap target akhir dokumen perencanaan, yang akan diuraikan pada subbagian berikutnya.

### **B. Perbandingan Realisasi Kinerja pada Level Program**

Sebagai pelengkap dalam memahami pergerakan kinerja pada level sasaran strategis dan indikator kinerja utama, perbandingan realisasi kinerja pada level program disajikan untuk memberikan konteks mengenai konsistensi capaian kinerja secara operasional. Penyajian pada level program dalam subbagian ini dimaksudkan untuk memperkuat pembacaan kecenderungan kinerja secara umum, tanpa memasuki analisis penyebab maupun efektivitas masing-masing program.

Adapun perbandingan realisasi kinerja program yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan periode 2021-2025 dan APBD Tahun 2025 disajikan pada Tabel berikut.

**tabel 3.2.2.c Perbandingan Realisasi Kinerja Program sesuai Dokumen Perencanaan 2021-2025 dan APBD Tahun 2025**

No	Sasaran Program	Indikator Program	Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Terwujudnya Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian yang Efektif	Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan	Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terwujudnya Sinergi Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan di bidang/tematik	100%	100%	100%	100%	100%
5	Terwujudnya Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Bidang/Tematik yang Efektif	Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan di bidang/tematik	100%	100%	100%	100%	100%
6	Meningkatnya Kesesuaian Agenda Riset dan Inovasi	Persentase Kesesuaian Agenda Riset	100%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Program	Indikator Program	Realisasi					
			2021	2022	2023	2024	2025	
	dengan Isu Strategis Daerah	dengan Isu Strategis Daerah						
7	Terwujudnya Kinerja Bappeda yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional serta Didukung oleh Kapabilitas SDM	7.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,06 (A)	79,60 (BB)	82,62 (A)	83,90 (A)	85,09 (A)
		7.2	Persentase Realisasi Anggaran	88,02%	87,26%	90,27%	90,36%	93,64%
		7.3	IP ASN	83,03	83,03	89,89	85,61	84,01
		7.4	Jumlah inovasi yang memenuhi 20 Indikator Indeks Inovasi Daerah Kemendagri	3 Inovasi	3 Inovasi	1 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi

Berdasarkan tabel tersebut, capaian kinerja pada sebagian besar program menunjukkan pola yang stabil sepanjang periode 2021-2025, dengan realisasi yang konsisten berada pada tingkat maksimal sesuai dengan indikator yang digunakan. Kondisi ini terlihat pada program-program yang berfokus pada sinergi perencanaan, pemantauan dan pengendalian pembangunan, ketersediaan data perencanaan, serta perencanaan bidang dan tematik, yang secara umum mencatat capaian 100 persen setiap tahun.

Pada program yang berkaitan dengan penguatan tata kelola internal perangkat daerah, pola capaian kinerja menunjukkan dinamika antar indikator. Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan persentase realisasi anggaran memperlihatkan kecenderungan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, indikator Indeks Profesionalitas ASN menunjukkan fluktiasi capaian antar tahun. Adapun indikator jumlah inovasi yang memenuhi 20 indikator Indeks Inovasi Daerah menunjukkan variasi realisasi yang menyesuaikan dengan target tahunan yang ditetapkan, sehingga perubahan jumlah inovasi pada tahun tertentu tidak dapat dimaknai sebagai penurunan kinerja secara langsung.

Berikutnya, dengan adanya perubahan kerangka perencanaan pada periode 2025-2029, maka perbandingan realisasi kinerja program juga disajikan dalam konteks awal periode perencanaan yang baru. Adapun perbandingan realisasi kinerja program Tahun 2024 dan Tahun 2025 disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 3.2.2.d Perbandingan Realisasi Kinerja Program sesuai Dokumen Perencanaan 2025-2029 dan Perubahan APBD Tahun 2025**

No	Sasaran Program	Indikator Program	Realisasi	
			2024	2025
1	Terwujudnya Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	90%	90,41%
2	Meningkatnya Kualitas Data Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Pembangunan yang Didukung Data Terstandar (konsep, metadata, sumber, satuan, jadwal publikasi jelas)	80%	80,60%
3	Terwujudnya Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian yang efektif	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah	85%	97,63%
4	Terwujudnya Sinergi Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang/tematik	90%	90,41%
5	Terwujudnya Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Bidang/Tematik yang efektif	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang/Tematik	85%	97,63%
6	Meningkatnya Kesesuaian Agenda Riset Daerah dengan Isu Strategis Daerah	Persentase Kesesuaian Agenda Riset dengan Isu Strategis Daerah pada Program Penelitian dan Pengembangan	80%	86,36%
7	Meningkatnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Litbang dan Inovasi Daerah	85%	94,74%
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	8.1	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,71%
		8.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90,36%
				93,64%

Berdasarkan tabel tersebut, capaian kinerja program pada Tahun 2025 secara umum menunjukkan peningkatan dibandingkan Tahun 2024, baik pada program yang mendukung kualitas perencanaan pembangunan daerah, pemantauan dan pengendalian kinerja, maupun penguatan data perencanaan. Peningkatan capaian juga terlihat pada program yang berkaitan dengan kesesuaian agenda riset daerah dengan isu strategis serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan, yang mencerminkan penguatan peran riset dan inovasi pada awal periode perencanaan 2025-2029.

Perlu dicermati bahwa terdapat beberapa indikator program yang memiliki nomenklatur serupa dengan indikator pada dokumen perencanaan periode 2021-2025, namun menunjukkan nilai realisasi yang berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya penyesuaian variabel penyusun dan formulasi penghitungan

indikator pada dokumen perencanaan periode 2025-2029, sehingga pada Tahun 2024 dilakukan penghitungan ulang terhadap realisasi indikator dimaksud. Kondisi ini menunjukkan adanya penyempurnaan metodologi pengukuran kinerja seiring dengan perubahan kerangka perencanaan.

Secara keseluruhan, perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan capaian tahun sebelumnya serta tren beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya kesinambungan dan penguatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto. Pada level sasaran strategis dan indikator kinerja utama, capaian kinerja memperlihatkan pola yang relatif konsisten pada akhir periode perencanaan 2021-2025 dan kecenderungan menguat pada awal periode perencanaan 2025-2029. Pola tersebut mengindikasikan bahwa transisi kerangka perencanaan tidak menimbulkan penurunan capaian kinerja secara signifikan.

Pada level program, perbandingan lintas tahun secara umum menunjukkan pola capaian yang sejalan dengan pergerakan kinerja pada level sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Variasi capaian yang terjadi pada beberapa indikator program terutama mencerminkan penyesuaian target dan formulasi pengukuran kinerja pada masing-masing periode perencanaan, sehingga perlu dibaca secara proporsional sebagai bagian dari dinamika perencanaan dan pengelolaan kinerja.

Berdasarkan pembacaan pola capaian kinerja tersebut, analisis selanjutnya perlu diarahkan untuk menilai posisi capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Oleh karena itu, pada subbab berikutnya akan disajikan Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 terhadap Target Akhir Rencana Strategis, guna memberikan gambaran mengenai jarak capaian kinerja dan arah pencapaiannya dalam kerangka perencanaan yang berlaku.

### **3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Akhir Renstra**

Subbab ini menyajikan posisi capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto sampai dengan Tahun 2025 terhadap target akhir Rencana Strategis. Penyajian dilakukan pada dua kerangka perencanaan, yaitu Renstra 2021-2025 dan Renstra 2025-2029, baik pada level sasaran strategis dan indikator kinerja utama maupun pada level program. Analisis difokuskan pada

pembacaan jarak capaian kinerja terhadap target akhir, tanpa membahas faktor penyebab maupun langkah tindak lanjut.

### **3.2.3.1. Posisi Capaian Kinerja terhadap Target Akhir Renstra 2021-2025**

#### **A. Level Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

Perbandingan realisasi kumulatif kinerja terhadap target akhir Renstra 2021-2025 pada level sasaran strategis dan indikator kinerja utama disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.2.3.a. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Renstra 2021-2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi					Target Akhir RENSTRA	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1 Persentase Kinerja Pengendalian perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1.2 Persentase Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1.3 Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Daerah yang dijalankan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut, sampai dengan Tahun 2025 seluruh indikator kinerja utama pada sasaran strategis meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah telah mencapai target akhir Renstra 2021–2025. Ketiga indikator menunjukkan capaian kumulatif sebesar 100 persen, sehingga tidak terdapat selisih capaian terhadap target akhir yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sasaran strategis pada Renstra 2021–2025 telah tercapai sepenuhnya pada akhir periode perencanaan.

Perlu dicatat bahwa sesuai Renstra Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2025, hanya terdapat satu sasaran strategis dengan tiga indikator kinerja utama. Adapun indikator kinerja lainnya berada di luar Renstra dan bersifat penugasan dari Kepala Daerah kepada Kepala Bappeda, sehingga tidak diperbandingkan dengan target akhir Renstra pada bagian ini.

## B. Level Program

Perbandingan realisasi kumulatif kinerja program terhadap target akhir Renstra 2021-2025 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.2.3.b Perbandingan Realisasi Kinerja Program terhadap Renstra 2021-2025

No	Sasaran Program	Indikator Program	Realisasi					Target Akhir RENSTRA	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	Terwujudnya Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian yang Efektif	Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan	Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terwujudnya Sinergi Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan di bidang/tematik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Terwujudnya Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Bidang/Tematik yang Efektif	Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan di bidang/tematik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Meningkatnya Kesesuaian Agenda Riset dan Inovasi dengan Isu Strategis Daerah	Persentase Kesesuaian Agenda Riset dengan Isu Strategis Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Terwujudnya Kinerja Bappeda yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional serta Didukung oleh Kapabilitas SDM	7.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,06 (A)	79,60 (BB)	82,62 (A)	83,90 (A)	85,09 (A)	84,50 (A)	100,70%
		7.2 Persentase Realisasi Anggaran	88,02%	87,26%	90,27%	90,36%	93,64%	91,50%	102,34%
		7.3 IP ASN	83,03	83,03	89,89	85,61	84,01	90,50	92,83%
		7.4 Jumlah inovasi yang memenuhi 20 Indikator Indeks Inovasi Daerah Kemendagri	3 Inovasi	3 Inovasi	1 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi	100%

Berdasarkan tabel tersebut, capaian kumulatif kinerja program sampai dengan Tahun 2025 secara umum telah mencapai bahkan melampaui target akhir Renstra 2021-2025. Seluruh indikator program perencanaan dan penelitian menunjukkan capaian 100 persen terhadap target akhir. Pada program penunjang, indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan persentase realisasi anggaran juga telah melampaui target akhir Renstra, sedangkan Indeks Profesionalitas ASN menunjukkan capaian di bawah target akhir. Adapun indikator inovasi daerah telah mencapai target akhir yang

ditetapkan. Capaian kinerja pada program penunjang tersebut, memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam penyelenggaraan perencanaan dan pengelolaan kinerja perangkat daerah.

### **3.2.3.2. Posisi Capaian Kinerja terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029**

#### **A. Level Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra 2025-2029 pada level sasaran strategis dan indikator kinerja utama disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.2.3.c Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Renstra 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		Target Akhir RENSTRA	Progres Capaian
			2024	2025		
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	IPPD (Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah)	79,40	85,87	82,50	104,08%
2	Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah	Tingkat Adopsi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi	58,07	66,67	66,00	101,02%
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	83,90 (A)	85,09 (A)	85,00 (A)	100,11%

Berdasarkan tabel tersebut, capaian Tahun 2025 menunjukkan bahwa indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) telah mencapai lebih dari 100 persen terhadap target akhir Renstra, sehingga secara kumulatif telah melampaui target yang ditetapkan. Indikator Tingkat Adopsi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi juga menunjukkan capaian di atas target akhir Renstra. Sementara itu, indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah telah mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian di atas 100 persen.

Dengan demikian, capaian Tahun 2025 pada level sasaran strategis dan indikator kinerja utama menunjukkan posisi awal yang kuat dalam pencapaian target akhir Renstra 2025-2029, meskipun Renstra tersebut baru berjalan secara resmi pada Tahun 2025.

#### **B. Level Program**

Perbandingan realisasi kinerja program Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra 2025-2029 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.2.3.d Perbandingan Realisasi Kinerja Program terhadap Renstra 2025-2029

No	Sasaran Program	Indikator Program	Realisasi		Target Akhir RENSTRA	Progres Capaian
			2024	2025		
1	Terwujudnya Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	90%	90,41%	95%	95,17%
2	Meningkatnya Kualitas Data Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Pembangunan yang Didukung Data Terstandar (konsep, metadata, sumber, satuan, jadwal publikasi jelas)	80%	80,60%	85%	94,82%
3	Terwujudnya Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian yang efektif	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah	85%	97,63%	90%	108,48%
4	Terwujudnya Sinergi Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang/tematik	90%	90,41%	95%	95,17%
5	Terwujudnya Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Bidang/Tematik yang efektif	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang/Tematik	85%	97,63%	90%	108,48%
6	Meningkatnya Kesesuaian Agenda Riset Daerah dengan Isu Strategis Daerah	Persentase Kesesuaian Agenda Riset dengan Isu Strategis Daerah pada Program Penelitian dan Pengembangan	80%	86,36%	85%	101,60%
7	Meningkatnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Litbang dan Inovasi Daerah	85%	94,74%	90%	105,27%
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	8.1 Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,71%	92,45%	91,25%	101,32%
		8.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90,36%	93,64%	91,00%	102,90%

Berdasarkan tabel tersebut, capaian kinerja program pada Tahun 2025 secara umum telah melampaui target akhir Renstra 2025-2029. Program-program perencanaan, pengendalian, dan penguatan data menunjukkan capaian di atas 100 persen terhadap target akhir. Program penelitian dan pengembangan daerah, termasuk indikator kesesuaian agenda riset dan pemanfaatan hasil litbang dan inovasi, juga telah

melampaui target akhir Renstra. Pada program penunjang, indikator tingkat kepuasan pengguna layanan kesekretariatan dan persentase realisasi anggaran perangkat daerah menunjukkan capaian di atas target akhir Renstra.

Secara keseluruhan, perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 terhadap target akhir Rencana Strategis menunjukkan bahwa pada Renstra 2021-2025 seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja utama telah tercapai sepenuhnya, didukung oleh capaian kinerja program yang secara umum telah memenuhi bahkan melampaui target akhir. Pada Renstra 2025-2029, capaian Tahun 2025 menunjukkan posisi awal yang kuat baik pada level sasaran strategis dan indikator kinerja utama maupun pada level program, meskipun periode perencanaan baru berjalan secara resmi pada Tahun 2025.

Posisi capaian kinerja terhadap target akhir Rencana Strategis tersebut menjadi dasar untuk menganalisis lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala pencapaian kinerja, yang akan diuraikan pada Subbab selanjutnya.

### **3.2.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Subbab ini menyajikan analisis atas faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dalam konteks pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan kinerja pada periode perencanaan yang sedang berjalan. Analisis diarahkan untuk memahami penyebab terjadinya peningkatan, penurunan, maupun stabilitas capaian kinerja sebagaimana telah disajikan pada subbab sebelumnya, dengan menempatkan kinerja dalam kerangka sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pembahasan dalam subbab ini difokuskan pada faktor-faktor strategis yang berkaitan dengan kualitas proses perencanaan pembangunan daerah, tingkat pemanfaatan riset dan inovasi dalam perumusan kebijakan, serta tata kelola dan sistem akuntabilitas kinerja. Dengan pendekatan tersebut, analisis tidak diarahkan pada penelusuran aspek teknis program dan kegiatan, melainkan pada pembacaan faktor-faktor sistemik yang mempengaruhi capaian kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi kinerja Bappeda Kabupaten Mojokerto pada periode perencanaan berjalan,

sekaligus menjadi dasar untuk menelusuri peran program dan kegiatan pada subbab selanjutnya serta merumuskan arah perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

### **3.2.4.1. Analisis Kinerja Berdasarkan Kualitas Proses Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)**

Dalam konteks pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada periode perencanaan yang sedang berjalan, Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) digunakan sebagai instrumen untuk membaca kualitas proses perencanaan secara menyeluruh. IPPD tidak hanya merepresentasikan capaian nilai, tetapi menggambarkan konsistensi tahapan perencanaan, keterpaduan dokumen, serta pemanfaatan data dan informasi dalam proses perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, indikator kinerja utama perencanaan pembangunan daerah menunjukkan capaian di atas target, dengan realisasi kinerja tercatat mencapai 107,74% sebagaimana ditunjukkan pada tabel kinerja pada subbab sebelumnya. Tren capaian indikator tersebut juga memperlihatkan kondisi yang stabil dan cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Capaian ini sejalan dengan hasil penilaian IPPD Tahun 2025 yang menempatkan kualitas proses perencanaan pada kategori baik, sehingga memperkuat keterkaitan antara kualitas proses perencanaan dan capaian kinerja strategis.

Pola peningkatan dan stabilitas tersebut menunjukkan bahwa penguatan kualitas proses perencanaan tidak bersifat insidental, melainkan merupakan hasil dari perbaikan mekanisme perencanaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsistensi antar dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, serta semakin kuatnya praktik perencanaan berbasis data, menjadi faktor yang mendorong capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah tetap terjaga dan melampaui target yang ditetapkan.

Namun demikian, hasil IPPD juga mengidentifikasi adanya ruang penguatan pada aspek tertentu dalam proses perencanaan. Beberapa tahapan perencanaan belum sepenuhnya didukung oleh mekanisme pengendalian dan evaluasi yang terintegrasi secara menyeluruh, khususnya dalam memastikan pemanfaatan hasil evaluasi dan kajian sebagai umpan balik dalam penyempurnaan perencanaan. Kondisi ini menjadi catatan strategis karena berpotensi mempengaruhi keberlanjutan peningkatan kualitas perencanaan apabila tidak diperkuat secara sistematis.

Secara keseluruhan, analisis berbasis IPPD menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja utama perencanaan pembangunan daerah yang melampaui target pada Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang kuat dengan kualitas proses perencanaan yang semakin tertata, meskipun masih terdapat area yang memerlukan penguatan untuk menjaga konsistensi kinerja pada periode perencanaan berjalan.

### **3.2.4.2. Analisis Kinerja Berdasarkan Tingkat Adopsi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi**

Pada periode awal implementasi dokumen perencanaan yang sedang berjalan, tingkat adopsi kebijakan berbasis riset dan inovasi menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan bukti dan pengetahuan. Adopsi riset dan inovasi dalam konteks ini dipahami sebagai pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi secara nyata dalam proses perumusan kebijakan, bukan sekadar ketersediaan dokumen kajian.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, indikator tingkat adopsi kebijakan berbasis riset dan inovasi menunjukkan capaian melampaui target yang ditetapkan, dengan realisasi kinerja tercatat mencapai 114,36% sebagaimana disajikan pada tabel kinerja pada subbab sebelumnya. Trend capaian indikator ini juga menunjukkan pergerakan yang meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang menandakan adanya penguatan peran riset dan inovasi dalam mendukung proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.

Peningkatan capaian tersebut mengindikasikan bahwa hasil-hasil riset dan inovasi mulai terintegrasi secara lebih konsisten dengan isu strategis pembangunan daerah. Kesesuaian antara agenda riset dengan kebutuhan kebijakan menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan tingkat adopsi, sehingga kontribusi riset tidak berhenti pada tahap rekomendasi, tetapi mulai tercermin dalam kebijakan dan perencanaan yang dirumuskan.

Di sisi lain, meskipun capaian indikator menunjukkan tren peningkatan dan telah melampaui target, hasil telaah juga memperlihatkan bahwa tingkat adopsi kebijakan berbasis riset dan inovasi belum sepenuhnya terlembaga secara merata pada seluruh tahapan kebijakan. Pada beberapa aspek, pemanfaatan hasil riset masih bersifat parsial dan bergantung pada konteks kebijakan tertentu. Kondisi ini menjadi faktor pembatas yang perlu dicermati karena berpotensi mempengaruhi konsistensi adopsi riset dan inovasi dalam jangka menengah.

Dengan demikian, capaian indikator adopsi kebijakan berbasis riset dan inovasi yang melampaui target pada Tahun 2025 serta tren peningkatan yang terlihat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan arah penguatan kebijakan berbasis bukti. Namun, penguatan pelembagaan pemanfaatan riset dan inovasi tetap menjadi aspek strategis yang mempengaruhi keberlanjutan capaian kinerja pada periode perencanaan berjalan.

### **3.2.4.3. Analisis Kinerja Berdasarkan Tata Kelola dan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)**

Dalam kerangka periode perencanaan yang sedang berjalan, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) digunakan untuk membaca kualitas tata kelola dan manajemen kinerja perangkat daerah secara menyeluruh. SAKIP tidak hanya merepresentasikan capaian nilai evaluasi, tetapi juga mencerminkan keterpaduan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta pemanfaatan hasil evaluasi dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah menunjukkan capaian melampaui target yang ditetapkan, dengan realisasi kinerja tercatat mencapai 101,30% sebagaimana disajikan pada tabel kinerja pada subbab sebelumnya. Tren capaian indikator ini juga memperlihatkan kondisi yang meningkat dibandingkan periode sebelumnya, yang menandakan adanya penguatan praktik manajemen kinerja dan konsistensi penerapan prinsip akuntabilitas di lingkungan Bappeda Kabupaten Mojokerto.

Peningkatan capaian tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola kinerja telah berjalan secara lebih sistematis, khususnya pada aspek keterkaitan antara perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja, serta kejelasan indikator dan target kinerja yang digunakan. Kualitas pelaporan kinerja yang semakin terstruktur dan selaras dengan dokumen perencanaan juga berkontribusi terhadap capaian Nilai SAKIP yang melampaui target, sekaligus memperkuat akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Di sisi lain, hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025 juga mengidentifikasi masih adanya ruang perbaikan pada beberapa aspek manajemen kinerja, terutama terkait pendalaman analisis kinerja dan pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Meskipun tidak menghambat pencapaian target

Nilai SAKIP secara keseluruhan, area tersebut berpotensi mempengaruhi konsistensi peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja apabila tidak dikelola secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang melampaui target pada Tahun 2025 serta tren peningkatan yang terlihat menunjukkan bahwa tata kelola dan sistem akuntabilitas kinerja telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian kinerja strategis Bappeda Kabupaten Mojokerto. Namun demikian, penguatan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja tetap menjadi faktor strategis yang mempengaruhi keberlanjutan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja pada periode perencanaan berjalan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kualitas proses perencanaan pembangunan daerah, tingkat adopsi kebijakan berbasis riset dan inovasi, serta tata kelola dan sistem akuntabilitas kinerja, capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menunjukkan kondisi yang relatif kuat dan cenderung menguat. Capaian indikator kinerja utama yang melampaui target, disertai tren kinerja yang stabil hingga meningkat, mencerminkan keterkaitan yang positif antara kualitas sistem perencanaan, basis kebijakan berbasis bukti, dan praktik manajemen kinerja perangkat daerah.

Penguatan kualitas proses perencanaan sebagaimana tercermin dalam hasil IPPD berkontribusi terhadap konsistensi capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah. Pada saat yang sama, meningkatnya tingkat adopsi kebijakan berbasis riset dan inovasi menunjukkan bahwa proses perencanaan dan pengambilan kebijakan mulai didukung secara lebih nyata oleh hasil kajian dan inovasi. Dari perspektif tata kelola, capaian Nilai SAKIP yang melampaui target dan menunjukkan tren peningkatan menegaskan bahwa pengelolaan kinerja perangkat daerah telah berjalan secara lebih sistematis dan terintegrasi.

Meskipun demikian, hasil analisis juga mengindikasikan masih adanya ruang penguatan pada aspek-aspek tertentu yang bersifat sistemik, khususnya terkait pelembagaan pemanfaatan hasil evaluasi dan kajian dalam siklus perencanaan dan pengambilan keputusan. Ruang penguatan tersebut tidak serta-merta menghambat pencapaian kinerja Tahun 2025, namun menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan peningkatan kinerja pada periode perencanaan yang sedang berjalan. Temuan-temuan strategis tersebut memberikan dasar untuk menilai hubungan antara capaian kinerja dan pemanfaatan sumber daya yang digunakan dalam mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu, analisis selanjutnya diarahkan pada pembacaan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja, yang akan diuraikan pada Subbab 3.2.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

### **3.2.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada subbab ini dimaknai sebagai pembacaan hubungan antara capaian kinerja dan pemanfaatan sumber daya secara makro. Efisiensi tidak dipahami semata-mata sebagai penghematan anggaran, melainkan sebagai kemampuan perangkat daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan capaian kinerja yang sepadan dan berorientasi pada sasaran strategis.

#### **3.2.5.1. Hubungan antara Capaian Kinerja dan Pemanfaatan Sumber Daya**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto menunjukkan hasil yang melampaui target. Seluruh indikator kinerja strategis yang dirujuk dalam perjanjian kinerja periode ini mencatat realisasi di atas 100,00 persen, sebagaimana telah disajikan pada subbab analisis kinerja sebelumnya. Capaian tersebut menjadi dasar awal untuk membaca efisiensi penggunaan sumber daya secara makro.

Pembacaan efisiensi secara makro juga menunjukkan tidak adanya indikasi ketidakseimbangan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan. Capaian kinerja yang stabil hingga meningkat dalam beberapa indikator strategis mencerminkan bahwa sumber daya yang tersedia telah diarahkan secara efektif untuk mendukung prioritas kinerja, sehingga efisiensi terbangun melalui optimalisasi proses, bukan melalui pengurangan kapasitas pelaksanaan. Dengan demikian, capaian kinerja yang melampaui 100% tidak dicapai melalui peningkatan input yang berlebihan, melainkan melalui pengelolaan sumber daya yang lebih terarah dan proporsional.

#### **3.2.5.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Perspektif Tata Kelola Kinerja**

Efisiensi penggunaan sumber daya tidak terlepas dari kualitas tata kelola kinerja yang diterapkan. Keselarasan antara perencanaan kinerja, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian kinerja memungkinkan sumber daya diarahkan secara lebih fokus

pada pencapaian sasaran strategis. Hal ini sejalan dengan capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 yang juga menunjukkan hasil melampaui target, sebagaimana telah diuraikan pada subbab sebelumnya.

Efisiensi penggunaan sumber daya juga didukung oleh penguatan pengendalian internal dan penyesuaian pola dukungan administrasi, sehingga pemanfaatan sumber daya dapat lebih terfokus pada kegiatan yang mendukung prioritas kinerja. Pendekatan tersebut tidak semata diarahkan pada penghematan, tetapi pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya agar selaras dengan sasaran dan target kinerja yang ditetapkan. Dalam perspektif ini, efisiensi dipahami sebagai bagian dari sistem tata kelola kinerja yang mendorong pencapaian hasil secara berkelanjutan. Pendekatan ini memperkuat pemahaman bahwa efisiensi merupakan hasil dari sistem manajemen kinerja yang tertata, bukan sekadar konsekuensi dari pembatasan belanja.

Berdasarkan analisis tersebut, efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja Tahun 2025 tercermin dari keterkaitan yang seimbang antara hasil yang dicapai dan sumber daya yang dimanfaatkan. Efisiensi bersifat sistemik dan didukung oleh tata kelola kinerja yang semakin terintegrasi, sehingga capaian kinerja strategis dapat diraih tanpa ketergantungan pada peningkatan input secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya telah menjadi bagian inheren dari pengelolaan kinerja perangkat daerah.

Hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk menelusuri peran program dan kegiatan secara lebih operasional dalam mendukung ataupun membatasi pencapaian kinerja, sebagaimana diuraikan pada Subbab 3.2.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja.

### **3.2.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja**

Subbab ini menelusuri pencapaian kinerja pada level operasional melalui kontribusi program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Analisis disusun dengan menelusuri keterkaitan antara program dan kegiatan terhadap masing-masing indikator kinerja strategis, sehingga peran dan kontribusinya terhadap pencapaian perjanjian kinerja dapat dibaca secara

lebih jelas dan proporsional. Pendekatan ini merupakan kelanjutan logis dari analisis faktor strategis dan efisiensi penggunaan sumber daya pada subbab sebelumnya.

### **3.2.6.1. Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)**

Indikator kinerja kualitas perencanaan pembangunan daerah menempatkan mutu proses perencanaan sebagai poros utama pencapaian kinerja. Capaian kinerja yang melampaui target pada indikator ini tidak berdiri sendiri, melainkan ditopang oleh keterpaduan pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Pada tataran operasional, kedua program tersebut berperan dalam memastikan kesinambungan siklus perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Kontribusi program tercermin dari peran koordinatif dan pengendalian dalam menjaga konsistensi dokumen perencanaan, keterpaduan lintas sektor, serta pengawalan prioritas pembangunan daerah. Mekanisme penyelarasan perencanaan antarperangkat daerah, pengendalian pelaksanaan rencana, serta evaluasi capaian kinerja pembangunan menjadi faktor kunci yang memperkuat kualitas proses perencanaan. Dengan demikian, capaian indikator kualitas perencanaan pembangunan daerah yang melampaui target merefleksikan efektifnya pengelolaan program dalam mengonsolidasikan proses perencanaan secara menyeluruh.

Pada level kegiatan, dukungan operasional terbangun melalui konsistensi pelaksanaan forum perencanaan, penguatan analisis berbasis data, serta pemantauan dan evaluasi yang memberikan umpan balik bagi penyempurnaan perencanaan. Faktor pendukung utama pada level ini adalah kesesuaian perencanaan dengan kebutuhan kebijakan dan koordinasi lintas perangkat daerah. Hambatan yang muncul bersifat terbatas dan dapat dikelola, sehingga tidak mengganggu capaian kinerja secara keseluruhan.

### **3.2.6.2. Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Tingkat Adopsi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi**

Indikator kinerja tingkat adopsi kebijakan berbasis riset dan inovasi menekankan sejauh mana hasil penelitian dan inovasi dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Capaian kinerja yang melampaui target

pada indikator ini ditopang oleh pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang berperan sebagai penghubung antara agenda riset dan kebutuhan kebijakan pembangunan.

Kontribusi program tercermin dari penguatan ekosistem riset dan inovasi melalui perumusan agenda penelitian yang relevan, diseminasi hasil kajian, serta fasilitasi pemanfaatan rekomendasi penelitian dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Pola tersebut memastikan bahwa riset tidak berhenti pada keluaran dokumen, melainkan berkontribusi nyata dalam mendukung kebijakan berbasis bukti. Dengan demikian, capaian indikator tingkat adopsi kebijakan berbasis riset dan inovasi mencerminkan keterpaduan program dalam mendorong pemanfaatan hasil kajian secara lebih sistematis.

Pada level kegiatan, dukungan operasional diwujudkan melalui pelaksanaan kajian tematik, pengolahan data, serta forum diseminasi dan advokasi kebijakan. Faktor pendukung utama adalah keselarasan topik riset dengan isu strategis pembangunan daerah serta keterlibatan pemangku kepentingan. Hambatan yang ditemui bersifat struktural dan tidak mengurangi capaian kinerja, namun menjadi catatan penting untuk penguatan pelembagaan pemanfaatan riset dan inovasi ke depan.

### **3.2.6.3. Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Indikator kinerja tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah menekankan kualitas sistem manajemen kinerja internal. Capaian kinerja yang melampaui target pada indikator ini ditopang oleh pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang berfungsi menyediakan dukungan kelembagaan dan administratif bagi penyelenggaraan manajemen kinerja perangkat daerah.

Kontribusi program terlihat pada penguatan perencanaan kinerja, pelaporan, serta pengendalian internal yang konsisten. Dukungan administrasi, pengelolaan sumber daya aparatur, dan tata kelola organisasi berperan sebagai faktor pendukung yang menjaga kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian, capaian indikator tata kelola dan akuntabilitas kinerja yang melampaui target merefleksikan kematangan sistem pengelolaan kinerja, bukan semata-mata kepatuhan administratif.

Pada level kegiatan, dukungan operasional terbangun melalui konsistensi pelaksanaan siklus manajemen kinerja dan koordinasi internal. Faktor pendukung utama adalah keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Hambatan yang muncul bersifat terbatas dan dapat dikelola, sehingga tidak mengganggu capaian kinerja secara keseluruhan.

#### **3.2.6.4. Faktor Penghambat dan Pembatas pada Level Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 tidak terlepas dari berbagai faktor penghambat dan pembatas yang mempengaruhi efektivitas pencapaian kinerja. Faktor-faktor tersebut muncul pada berbagai tahapan pelaksanaan, mulai dari perencanaan operasional, pelaksanaan kegiatan, hingga proses pengendalian dan evaluasi. Pembacaan terhadap faktor penghambat ini dilakukan secara proporsional untuk memahami konteks pelaksanaan kinerja, bukan semata-mata untuk menilai keberhasilan atau kegagalan capaian.

Pada indikator kinerja kualitas perencanaan pembangunan daerah, faktor pembatas terutama berkaitan dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan penyesuaian substansi perencanaan. Perubahan arah kebijakan, penyesuaian prioritas pembangunan, serta sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan provinsi menuntut fleksibilitas dalam proses perencanaan dan pengendalian. Kondisi tersebut berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan koordinasi lintas perangkat daerah serta penyesuaian data dan dokumen perencanaan, yang pada beberapa tahapan berpotensi memperlambat proses tanpa mengurangi kualitas hasil yang dicapai.

Pada indikator kinerja tingkat adopsi kebijakan berbasis riset dan inovasi, faktor penghambat lebih bersifat struktural dan kultural. Keterbatasan waktu antara selesainya kajian dengan momentum pengambilan kebijakan, variasi tingkat kesiapan perangkat daerah dalam memanfaatkan hasil riset, serta kebutuhan penyelarasan rekomendasi penelitian dengan kerangka regulasi yang berlaku menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, proses diseminasi dan internalisasi hasil riset memerlukan tahapan bertahap agar dapat diadopsi secara optimal dalam perencanaan dan kebijakan, sehingga dampaknya tidak selalu dapat terlihat secara instan dalam satu periode pelaporan.

Sementara itu, pada indikator kinerja tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, faktor pembatas terutama terkait dengan dinamika sumber daya aparatur dan beban administrasi. Perubahan komposisi aparatur, penyesuaian tugas dan fungsi,

serta tuntutan pemenuhan berbagai instrumen akuntabilitas memerlukan konsistensi pengelolaan dan pengendalian internal. Kondisi ini menuntut penguatan koordinasi internal dan penyesuaian mekanisme kerja agar pelaksanaan program dan kegiatan tetap selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, faktor penghambat dan pembatas yang muncul pada level program dan kegiatan bersifat kontekstual dan dapat dikelola. Faktor-faktor tersebut tidak berdampak signifikan terhadap capaian kinerja strategis yang secara keseluruhan melampaui target, namun memberikan pembelajaran penting mengenai perlunya penguatan koordinasi, peningkatan kesiapan perangkat daerah, serta konsistensi pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. Pembacaan ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa perbaikan pelaksanaan pada periode berikutnya dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran.

Berdasarkan analisis tersebut, capaian kinerja Tahun 2025 yang melampaui target pada seluruh indikator kinerja strategis ditopang oleh keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan yang dikelola secara konsisten dan terarah. Program dan kegiatan tidak hanya berfungsi sebagai sarana implementasi, tetapi menjadi instrumen penting dalam menerjemahkan faktor-faktor strategis dan efisiensi penggunaan sumber daya ke dalam praktik operasional yang nyata.

Di sisi lain, analisis juga menunjukkan adanya faktor penghambat dan pembatas pada level program dan kegiatan yang bersifat kontekstual, baik yang berkaitan dengan dinamika kebijakan, kesiapan pemanfaatan hasil riset dan inovasi, maupun pengelolaan tata kelola dan sumber daya aparatur. Faktor-faktor tersebut tidak berdampak signifikan terhadap capaian kinerja secara keseluruhan, namun memberikan pembelajaran penting mengenai perlunya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, peningkatan kesiapan kelembagaan, serta konsistensi pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan demikian, hasil analisis pada subbab ini menegaskan bahwa keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2025 merupakan hasil dari kombinasi antara kekuatan desain program, efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan kemampuan perangkat daerah dalam mengelola tantangan operasional. Temuan tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan rencana tindak lanjut untuk menjaga keberlanjutan capaian kinerja dan mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan pada periode berikutnya,

sebagaimana diuraikan pada Subbab 3.2.7 Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Capaian Kinerja di Tahun Berikutnya.

### **3.2.7. Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Capaian Kinerja di Tahun Berikutnya**

Rencana tindak lanjut disusun sebagai respons atas hasil analisis capaian kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya, serta pembacaan faktor pendukung dan penghambat pada level program dan kegiatan. Rencana ini diarahkan untuk menjaga keberlanjutan capaian kinerja yang telah melampaui target sekaligus memperkuat area yang masih memerlukan penyempurnaan. Pendekatan yang digunakan menekankan kesinambungan antara penguatan sistem, peningkatan kualitas proses, dan konsistensi pengendalian kinerja sebagai satu kesatuan siklus manajemen kinerja.

#### **3.2.7.1. Rencana Tindak Lanjut pada Indikator Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah**

Sebagai tindak lanjut atas capaian kualitas perencanaan pembangunan daerah yang telah melampaui target, fokus perbaikan diarahkan pada penguatan konsistensi proses perencanaan dan pengendalian. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan kualitas sinkronisasi perencanaan lintas perangkat daerah, penguatan pengendalian pelaksanaan rencana, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai umpan balik dalam penyempurnaan perencanaan. Langkah ini ditujukan untuk memastikan bahwa kualitas perencanaan tidak hanya terjaga, tetapi juga adaptif terhadap dinamika kebijakan dan kebutuhan pembangunan daerah.

Selain itu, rencana tindak lanjut juga diarahkan pada penguatan basis data dan analisis dalam proses perencanaan. Penyempurnaan mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data menjadi penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih presisi dan berbasis bukti. Dengan demikian, peningkatan kualitas perencanaan diharapkan dapat terus berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah pada periode berikutnya.

#### **3.2.7.2. Rencana Tindak Lanjut pada Indikator Tingkat Adopsi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi**

Untuk meningkatkan tingkat adopsi kebijakan berbasis riset dan inovasi, rencana tindak lanjut difokuskan pada penguatan keterhubungan antara hasil penelitian dengan proses perumusan kebijakan dan perencanaan. Upaya yang dilakukan mencakup penyelarasan agenda riset dengan isu strategis pembangunan daerah, peningkatan intensitas diseminasi hasil kajian, serta penguatan mekanisme advokasi kebijakan berbasis bukti kepada perangkat daerah terkait.

Selain itu, rencana tindak lanjut diarahkan pada peningkatan kesiapan perangkat daerah dalam memanfaatkan hasil riset dan inovasi. Penguatan kapasitas pemangku kepentingan, penyederhanaan mekanisme adopsi rekomendasi penelitian, serta penguatan koordinasi antarunit menjadi langkah penting agar hasil riset dapat diinternalisasikan secara lebih efektif. Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat dan memperluas pemanfaatan riset dan inovasi dalam kebijakan pembangunan daerah.

### **3.2.7.3. Rencana Tindak Lanjut pada Indikator Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Pada indikator tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, rencana tindak lanjut diarahkan pada penguatan konsistensi penerapan sistem manajemen kinerja. Langkah yang ditempuh meliputi penyempurnaan perencanaan kinerja, peningkatan kualitas pelaporan, serta penguatan pengendalian internal untuk memastikan keterkaitan yang jelas antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kinerja.

Rencana tindak lanjut juga mencakup penguatan koordinasi internal dan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan kinerja. Penyesuaian mekanisme kerja, pemanfaatan hasil evaluasi kinerja, serta penguatan budaya kinerja menjadi bagian penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas tata kelola. Dengan pendekatan ini, capaian akuntabilitas kinerja diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

### **Integrasi Rencana Tindak Lanjut dengan Hasil Evaluasi AKIP**

Selain merespons hasil analisis capaian kinerja dan faktor operasional pada level program dan kegiatan, rencana tindak lanjut yang disusun juga secara eksplisit mengakomodir catatan dan rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2025. Rekomendasi evaluasi tersebut dijadikan rujukan dalam penyempurnaan

implementasi sistem akuntabilitas kinerja, terutama pada aspek penguatan perencanaan kinerja, peningkatan keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, penyempurnaan pengukuran dan pelaporan kinerja, serta penguatan mekanisme pengendalian internal.

Selanjutnya, rencana tindak lanjut pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya diarahkan selaras dengan matriks tindak lanjut hasil evaluasi AKIP, sehingga setiap langkah perbaikan yang dirumuskan tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki keterkaitan langsung dengan upaya peningkatan kualitas implementasi SAKIP perangkat daerah. Dengan pendekatan tersebut, rencana tindak lanjut tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kinerja, tetapi juga mendorong terbangunnya proses pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan kinerja.

Secara keseluruhan, rencana tindak lanjut yang disusun merupakan upaya sistematis untuk menjaga keberlanjutan capaian kinerja yang telah melampaui target sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan pada periode berikutnya. Rencana tindak lanjut tidak hanya disusun berdasarkan hasil pengukuran dan analisis kinerja, tetapi juga terintegrasi dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, sehingga perbaikan yang direncanakan bersifat menyeluruh dan berkesinambungan.

Dengan terlaksananya rencana tindak lanjut ini, diharapkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto pada tahun-tahun mendatang dapat terus meningkat, sejalan dengan penguatan kualitas perencanaan, pemanfaatan riset dan inovasi, serta peningkatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

### **3.3 Prestasi Kinerja Lainnya**

Selain capaian kinerja yang diukur melalui indikator kinerja dan perjanjian kinerja, kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 juga tercermin melalui berbagai prestasi kinerja yang menunjukkan penguatan kualitas tata kelola kinerja perangkat daerah, perencanaan, serta pemanfaatan riset dan inovasi. Prestasi-prestasi tersebut menjadi pelengkap penting dalam membaca kinerja secara lebih utuh, khususnya untuk menangkap dimensi pengakuan komparatif dan posisi kinerja relatif terhadap pemerintah daerah lain.

Prestasi kinerja ini tidak berdiri terpisah dari capaian kinerja utama yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, melainkan merupakan hasil lanjutan dari tata kelola kinerja yang semakin akuntabel, konsistensi penerapan perencanaan yang berkualitas, serta penguatan kebijakan berbasis bukti. Dengan demikian, capaian yang ditunjukkan pada subbab ini dapat dipahami sebagai refleksi atas kematangan proses dan sistem kerja yang telah dibangun, bukan sekadar capaian administratif.

Dalam konteks tersebut, pembacaan prestasi kinerja difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu akuntabilitas kinerja perangkat daerah, kualitas perencanaan pembangunan daerah, serta tingkat adopsi kebijakan berbasis riset dan inovasi. Ketiga aspek tersebut disajikan secara terpadu dalam satu tabel perbandingan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya, provinsi, maupun kementerian/lembaga, dengan tetap memperhatikan ketersediaan dan kesetaraan data yang digunakan.

Sebagai gambaran komparatif atas prestasi kinerja tersebut, berikut disajikan perbandingan capaian pada aspek akuntabilitas kinerja perangkat daerah, kualitas perencanaan pembangunan daerah, serta tingkat adopsi kebijakan berbasis riset dan inovasi dalam satu tabel terpadu, dengan catatan bahwa sebagian data pembanding masih menggunakan data Tahun 2024 karena data Tahun 2025 belum seluruhnya tersedia.

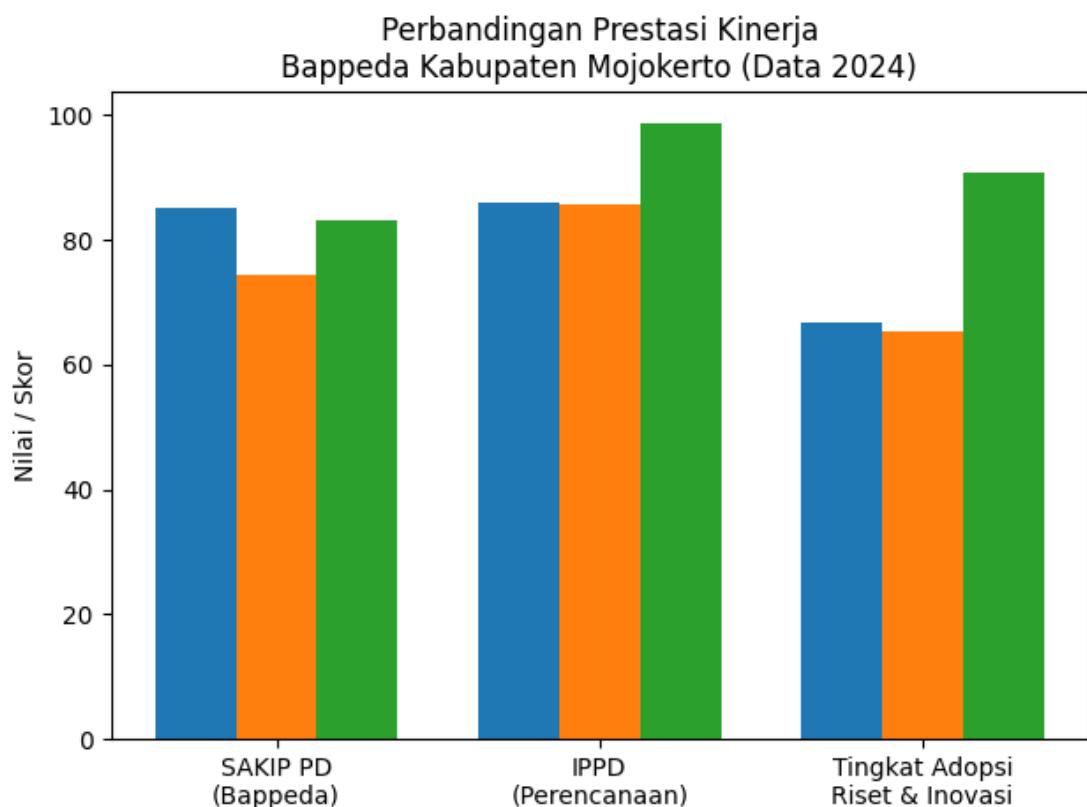
**Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Provinsi, maupun Kementerian/Lembaga**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi BAPPEDA Kab. Mojokerto	Realisasi Kab/Kota/Provinsi	Realisasi Provinsi/K/L/Nasional	Ket.
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	85,09 (A)	74,42 (BB)*	83,29 (A)*	Merupakan Nilai SAKIP Pemkab Mojokerto dan BAPPENAS tahun 2024 karena 2025 belum keluar nilainya.
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	IPPD (Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah)	85,87	85,65*	98,82*	Merupakan Nilai IPPD Pemkab Lumajang dan BAPPENAS tahun 2024 karena 2025 belum keluar nilainya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi BAPPEDA Kab. Mojokerto	Realisasi Kab/Kota/Provinsi	Realisasi Provinsi/K/L/Nasional	Ket.
3	Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah	Tingkat Adopsi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi	66,67	65,35*	90,84*	Nilai tersebut merupakan Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Mojokerto dan Provinsi Jawa Timur.

Untuk memperjelas pembacaan komparatif tersebut, capaian yang sama juga disajikan dalam bentuk grafik berikut.

Grafik 3.3 Perbandingan Prestasi Kinerja Bappeda Kabupaten Mojokerto



#### a. Prestasi pada Aspek Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Pada aspek akuntabilitas kinerja perangkat daerah, nilai SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto tercatat sebesar 85,09 dengan predikat A. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai pembanding Kabupaten Lumajang sebesar 74,42 dengan predikat BB, yang seluruhnya bersumber dari hasil evaluasi Tahun 2024, mengingat data evaluasi SAKIP Tahun 2025 belum tersedia pada saat

penyusunan laporan ini. Selain itu, sebagai pembanding pada level nasional digunakan nilai SAKIP sebesar 83,29 dengan predikat A yang juga bersumber dari hasil evaluasi Tahun 2024.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola dan sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah telah berada pada kategori yang sangat baik dan memperoleh pengakuan secara komparatif. Posisi nilai yang lebih tinggi dibandingkan pembanding daerah dan nasional mencerminkan kematangan sistem manajemen kinerja serta konsistensi penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

#### **b. Prestasi pada Aspek Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah**

Pada aspek kualitas perencanaan pembangunan daerah, capaian Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto tercatat sebesar 85,87. Nilai tersebut berada sedikit di atas nilai pembanding Kabupaten Lumajang sebesar 85,65, yang seluruhnya bersumber dari hasil penilaian Tahun 2024, mengingat data IPPD Tahun 2025 belum tersedia pada saat penyusunan laporan ini. Selain itu, sebagai pembanding pada level nasional digunakan nilai IPPD sebesar 98,82 yang juga bersumber dari penilaian Bappenas Tahun 2024.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto telah berada pada kategori yang baik dan kompetitif di tingkat kabupaten/kota. Meskipun masih terdapat selisih dibandingkan capaian nasional, posisi ini mencerminkan penguatan perencanaan yang konsisten dan terstruktur, dengan tetap mempertimbangkan perbedaan konteks, skala kewenangan, dan kapasitas antar level pemerintahan.

#### **c. Prestasi pada Aspek Tingkat Adopsi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi**

Pada aspek tingkat adopsi kebijakan berbasis riset dan inovasi, capaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto tercatat sebesar 66,67. Untuk kepentingan pembandingan, digunakan Indeks Inovasi Daerah (IID) sebagai proksi, mengingat indikator tingkat adopsi kebijakan berbasis riset dan inovasi tidak tersedia secara langsung pada level kabupaten/kota maupun provinsi. Nilai pembanding yang digunakan masing-masing sebesar 65,35 untuk Kabupaten Mojokerto dan 90,84 untuk Provinsi Jawa Timur.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah berada pada posisi yang relatif sebanding dengan capaian daerah pembanding di tingkat kabupaten, meskipun masih terdapat ruang peningkatan jika dibandingkan dengan capaian provinsi. Penggunaan IID sebagai indikator pembanding memberikan gambaran bahwa upaya penguatan inovasi dan adopsi kebijakan berbasis riset telah berjalan, meskipun penguatan lebih lanjut masih diperlukan untuk meningkatkan daya ungkitnya terhadap kebijakan pembangunan daerah.

Prestasi kinerja yang dicapai pada Tahun 2025 tersebut memperkuat gambaran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto secara menyeluruh. Capaian pada aspek akuntabilitas kinerja perangkat daerah, kualitas perencanaan pembangunan daerah, serta tingkat adopsi kebijakan berbasis riset dan inovasi menunjukkan bahwa kinerja yang dihasilkan tidak hanya memenuhi target internal, tetapi juga memperoleh pengakuan secara komparatif dengan tetap memperhatikan keterbatasan ketersediaan data lintas tahun.

Prestasi tersebut menjadi modal penting dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan pemangku kepentingan, sekaligus memperkuat posisi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam mendorong peningkatan tata kelola kinerja internal, kualitas perencanaan, serta pemanfaatan riset dan inovasi pada periode berikutnya. Seiring dengan capaian tersebut, pengelolaan anggaran yang akuntabel dan bertanggung jawab menjadi faktor pendukung penting dalam pencapaian kinerja, yang selanjutnya diuraikan pada Subbab 3.4 Akuntabilitas Anggaran.

### **3.4 Akuntabilitas Anggaran**

Akuntabilitas anggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dalam konteks Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, pembacaan anggaran tidak hanya diarahkan pada tingkat serapan, tetapi terutama pada keterkaitannya dengan capaian kinerja yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya. Anggaran diposisikan sebagai instrumen pendukung pencapaian kinerja, sehingga pemanfaatannya perlu dibaca secara proporsional antara input yang digunakan dan hasil yang dicapai.

Sejalan dengan capaian kinerja strategis yang telah melampaui target, pengelolaan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung prioritas kinerja secara efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, analisis akuntabilitas anggaran pada subbab ini disajikan melalui pembacaan realisasi anggaran, keterkaitannya dengan capaian kinerja, serta efisiensi pemanfaatan anggaran secara operasional.

### **3.4.1. Realisasi Anggaran Tahun 2025**

Sebagai gambaran umum pengelolaan anggaran, berikut disajikan realisasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menurut program.

Tabel 3.4.1 Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.207.519.708	1.122.765.117	92,98%
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.784.522.738,00	2.733.393.926,00	98,16%
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	598.675.850	540.278.259	90,25%
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	8.184.922.304	7.566.343.139	92,44%
<b>TOTAL</b>		<b>12.775.640.600</b>	<b>11.962.780.441</b>	<b>93,64%</b>

Berdasarkan tabel tersebut, total anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sebesar Rp12.775.640.600 dengan realisasi sebesar Rp11.962.780.441 atau mencapai 93,64%. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran berada pada kategori tinggi dan terkendali, serta mencerminkan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Secara program, realisasi anggaran berada pada kisaran 90,25% hingga 98,16%, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan anggaran relatif merata dan tidak menunjukkan adanya deviasi signifikan antarprogram. Kondisi ini mencerminkan

konsistensi dalam pengendalian pelaksanaan anggaran serta keselarasan antara perencanaan dan realisasi kegiatan sepanjang Tahun 2025.

### **3.4.2. Keterkaitan Realisasi Anggaran dengan Capaian Kinerja**

Untuk melihat keterkaitan antara anggaran yang digunakan dengan hasil yang dicapai, berikut disajikan perbandingan antara capaian kinerja dan capaian anggaran berdasarkan sasaran strategis perangkat daerah.

Tabel.3.4.2 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	IPPD (Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah)	79,70	85,87	107,74%	Rp3.992.042.446	Rp3.856.159.043	96,60%
2	Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah	Tingkat Adopsi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi	58,30	66,67	114,36%	Rp598.675.850	Rp540.278.259	90,25%
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	84,00 (A)	85,09 (A)	101,30%	Rp8.184.922.304	Rp7.566.343.139	92,44%
			<b>Rata-rata capaian</b>		<b>107,80%</b>	<b>Total capaian</b>		<b>93,64%</b>

Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata capaian kinerja strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 mencapai 107,80%, sementara capaian anggaran secara agregat tercatat sebesar 93,64%. Perbandingan ini menunjukkan bahwa target kinerja strategis dapat dicapai bahkan melampaui target dengan tingkat pemanfaatan anggaran yang lebih rendah dibandingkan capaian kinerjanya.

Pada sasaran peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, capaian kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah mencapai 107,74%, dengan capaian anggaran sebesar 96,60%. Demikian pula pada sasaran peningkatan peran riset dan inovasi dalam pembangunan daerah, capaian kinerja tercatat sebesar 114,36%, dengan capaian anggaran 90,25%. Sementara itu, pada sasaran peningkatan kualitas tata kelola penunjang pencapaian kinerja perangkat daerah, capaian kinerja mencapai 101,30%, dengan capaian anggaran 92,44%.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja strategis tidak hanya didukung oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga oleh efektivitas pemanfaatan anggaran. Dengan kata lain, kinerja yang melampaui target dapat dicapai tanpa harus

merealisasikan anggaran secara maksimal, yang mencerminkan adanya pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berorientasi hasil.

### **3.4.3. Efisiensi dan Efektivitas Pemanfaatan Anggaran**

Dengan capaian kinerja perangkat daerah pada Tahun 2025 sebesar 107,80% dan capaian keuangan sebesar 93,64%, tingkat efisiensi kinerja tercatat sebesar 14,16%. Nilai efisiensi tersebut diperoleh dari selisih antara capaian kinerja dan capaian keuangan, sesuai dengan formula penghitungan efisiensi kinerja yang digunakan dalam kerangka evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Angka ini menunjukkan bahwa target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai secara penuh tanpa memerlukan pemanfaatan anggaran secara maksimal.

Efisiensi tersebut mencerminkan tidak ditemukannya pemborosan anggaran yang signifikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Realisasi anggaran berada pada tingkat yang proporsional terhadap hasil yang dicapai, sehingga tidak menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara input anggaran dan capaian kinerja. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara terkendali dan bertanggung jawab.

Pada level operasional, efisiensi pemanfaatan anggaran diwujudkan melalui penajaman prioritas belanja pada program dan kegiatan yang memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian kinerja strategis, serta pengendalian terhadap belanja yang bersifat administratif dan kurang strategis. Pengaturan kembali kebutuhan operasional, pengendalian intensitas kegiatan pendukung, serta penguatan disiplin pelaksanaan anggaran menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran memberikan nilai tambah terhadap pencapaian kinerja.

Selain itu, efisiensi juga didukung oleh optimalisasi proses kerja dan dukungan administrasi, termasuk penguatan koordinasi antarunit, penyesuaian mekanisme kerja, serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia secara lebih efektif. Langkah-langkah tersebut memungkinkan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan secara optimal tanpa penambahan kebutuhan anggaran, sekaligus menjaga kualitas hasil yang dicapai.

Dengan demikian, efisiensi pemanfaatan anggaran pada Tahun 2025 tidak hanya tercermin dari selisih antara capaian kinerja dan capaian keuangan, tetapi juga dari kualitas pengelolaan anggaran yang mampu mendukung pencapaian kinerja secara efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 telah dilaksanakan secara akuntabel dan berorientasi pada pencapaian kinerja. Realisasi anggaran yang tinggi dan terkendali, keterkaitan yang jelas antara anggaran dan capaian kinerja, serta efisiensi pemanfaatan anggaran yang tercermin hingga level operasional menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan secara efektif untuk mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

Akuntabilitas anggaran tersebut melengkapi keseluruhan pembacaan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana diuraikan dalam BAB III, dan menjadi dasar penting dalam merumuskan simpulan serta arah perbaikan kinerja pada BAB IV.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Secara umum, kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif dan melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan konsistensi pelaksanaan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang semakin terintegrasi, serta kemampuan perangkat daerah dalam menerjemahkan arah kebijakan pembangunan ke dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah tercermin dari capaian kinerja yang melebihi target, didukung oleh proses perencanaan yang lebih sistematis, berbasis data, dan selaras dengan dokumen perencanaan daerah. Di sisi lain, pemanfaatan riset dan inovasi dalam kebijakan pembangunan menunjukkan perkembangan yang semakin baik, meskipun masih memerlukan penguatan agar hasil kajian dapat dimanfaatkan secara lebih luas dan konsisten oleh seluruh perangkat daerah.

Dari aspek tata kelola, penguatan sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah memberikan kontribusi penting terhadap capaian kinerja secara keseluruhan. Keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja semakin jelas, sehingga capaian kinerja yang diraih tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan peningkatan kualitas pengelolaan kinerja secara substantif. Capaian kinerja tersebut juga didukung oleh pengelolaan anggaran yang akuntabel dan efisien. Kinerja yang melampaui target dapat dicapai dengan tingkat realisasi anggaran yang proporsional, yang menunjukkan adanya keselarasan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang dimanfaatkan. Hal ini memperkuat bukti bahwa anggaran telah digunakan secara efektif untuk mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

#### **4.1 Pembelajaran dan Tantangan Kinerja**

Pelaksanaan kinerja Tahun 2025 memberikan sejumlah pembelajaran penting bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto. Konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terbukti menjadi faktor kunci dalam pencapaian kinerja yang optimal. Selain itu, penguatan koordinasi lintas perangkat

daerah dan pemanfaatan hasil evaluasi sebagai umpan balik perbaikan menjadi elemen penting dalam menjaga kualitas kinerja secara berkelanjutan.

Di sisi lain, masih terdapat tantangan yang perlu mendapat perhatian ke depan, khususnya dalam memperluas pemanfaatan riset dan inovasi sebagai dasar perumusan kebijakan serta memperkuat integrasi lintas sektor dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Tantangan tersebut tidak mengurangi capaian kinerja yang telah diraih, namun menjadi ruang perbaikan untuk meningkatkan daya ungkit kinerja pada periode berikutnya.

#### **4.2 Arah dan Upaya Peningkatan Kinerja ke Depan**

Ke depan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja yang telah diraih melalui penguatan sistem perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan semakin berkualitas, adaptif terhadap dinamika kebijakan, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara tepat sasaran.

Peningkatan pemanfaatan riset dan inovasi akan terus didorong sebagai bagian dari penguatan kebijakan berbasis bukti, sejalan dengan arah perencanaan pembangunan daerah periode 2025-2029. Selain itu, penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah tetap menjadi prioritas, termasuk dalam memastikan keterkaitan yang lebih erat antara kinerja dan pengelolaan anggaran.

Dengan arah dan upaya tersebut, diharapkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto pada tahun-tahun mendatang dapat terus meningkat secara berkelanjutan, serta memberikan kontribusi yang semakin optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Mojokerto, Januari 2026  
Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah  
Kabupaten Mojokerto



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik



Drs. BAMBANG EKO WAHYUDI, M.Si.  
NIP 19660618 199003 1 011

## **LAMPIRAN**

Dokumen-dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025, secara lengkap dapat diunduh melalui tautan [bit.ly/DataDukungLKjIP2025](http://bit.ly/DataDukungLKjIP2025)

A. Adapun dokumen pendukung yang dimuat antara lain:

1. SK IKU Tahun 2025
2. Pohon Kinerja dan Cascading Bappeda tahun 2025
3. Renstra Tahun 2025-2029
4. P-Renja 2025
5. Dokumen dan Laporan Bukti Pencapaian Kinerja Bappeda pada tahun 2025

B. Adapun dokumen pendukung yang dicantumkan secara langsung dalam Lampiran LKjIP ini, antara lain:

1. Perjanjian Kinerja APBD 2025
2. Perjanjian Kinerja P-APBD 2025



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Bambang Eko Wahyudi, M.Si.  
Jabatan: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Albaraa  
Jabatan: Bupati Mojokerto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 13 Maret 2025

Pihak Kedua  
Bupati Mojokerto

Muhammad Albaraa

Pihak Pertama  
Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah  
Kabupaten Mojokerto

Drs. Bambang Eko Wahyudi, M.Si.  
Pembina Utama Muda/ IVc  
NIP 198606181990031011

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN MOJOKERTO**

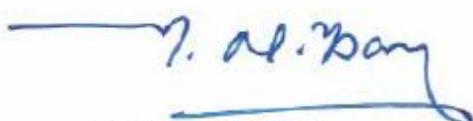
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1	Persentase Kinerja Pengendalian perencanaan Pembangunan daerah	100%
		1.2	Persentase Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	100%
		1.3	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Daerah yang dijalankan Perangkat Daerah	100%

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 7.228.710.500	APBD 2025
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 1.339.109.308	APBD 2025
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 2.698.130.787	APBD 2025
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 355.499.000	APBD 2025

Mojokerto, 13 Maret 2025

Pihak Kedua  
Bupati Mojokerto



Muhammad Albaraa

Pihak Pertama  
Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah  
Kabupaten Mojokerto



Drs. Bambang Eko Wahyudi, M.Si.  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP 196606181990031011



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Bambang Eko Wahyudi, M.Si.  
Jabatan: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Albaraa  
Jabatan: Bupati Mojokerto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 30 September 2025

Pihak Kedua  
Bupati Mojokerto

Muhammad Albaraa

Pihak Pertama  
Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah  
Kabupaten Mojokerto

Drs. Bambang Eko Wahyudi, M.Si.

Pembina Utama Muda/ IVc  
NIP 196606181990031011

Lampiran

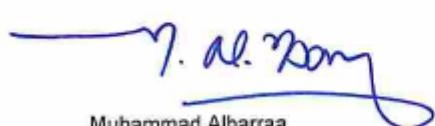
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN MOJOKERTO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	IPPD (Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah)	79,70
2	Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah	Tingkat Adopsi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi	58,30
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	84

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 8.184.922.304	PAPBD 2025
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 1.207.519.708	PAPBD 2025
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 2.784.522.738	PAPBD 2025
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 598.675.850	PAPBD 2025

Mojokerto, 30 September 2025

Pihak Kedua  
Bupati Mojokerto



Muhammad Albaraa

Pihak Pertama  
Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah  
Kabupaten Mojokerto



Drs. Bambang Eko Wahyudi, M.Si.  
Pembina Utama Muda/ IVc  
NIP 196606181990031011

Formulir E.81  
 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkungan Kabupaten  
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)  
 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun pelaksanaan renja (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							I		II		III		IV								
							K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan gunaan Daerah		Persentase Kinerja Pengendalian perencanaan Pembangunan daerah(persen)			100 ,00															Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
2		[PROGRAM] 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah(%)	5.094.840. 611,00	3.852.448. 965,00	100 ,00	1.207.519 .708,00	17, 00	239.903.9 22,00	58, 00	329.560.5 37,00	15, 00	112.099.1 86,00	10	44120147 2	100 ,00	1.122.765. 117,00	5.416.415. 554,00	106, 31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
3		[KEGIATAN] 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Kesesuaian sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan target prioritas; indikator makro dan target ; Isu Strategis antar dokumen perencanaan daerah dengan dokren instansi vertikal(%)	4.383.540. 811,00	3.258.880. 113,00	100 ,00	1.059.269 .908,00	25, 00	22722742 2	50, 00	31600253 7	25, 00	82204186	0, 0	36025936 8	100 ,00	985.693.51 3,00	4.604.832. 994,00	105, 05	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.01.0 005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota( Berita Acara)			2,0 0	444.172.3 08,00	1,0 0	23.920.00 0,00	1,0 0	272.785.8 00,00	0,0 0	8.526.000 ,00	0,0 0	123.644.4 00,00	2,0 0	428.876.20 0,00			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	K R	K R	K R	K R	K R	K R	K R	K R	K R	
4	[SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.01.0 007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dokumen)			3,0 0	615.097,6 00,00	0,0 0	203.307,4 22,00	1,0 0	43.216,73 7,00	2,0 0	73.678,18 6,00	0,0 0	236.614,9 68,00	3,0 0	556.817,31 3,00							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bapped a)
		Percentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah(%)			100 ,00		17		17, 00		25, 00		41										
3	[KEGIATAN] 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Percentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan(%)		597.996,80 0,00	414.417,2 02,00	100 ,00	77.724,80 0,00	17, 00	11631500	17, 00	6878000	25, 00	6960000	41, 00	48318200	100 ,00	73.787.700 ,00	536.523,1 02,00		89,7 2		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bapped a)	
4	[SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.03.0 001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan(Laporan)			1,0 0	27.501,30 0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	2.723.000 ,00	0,0 0	6.960.000 ,00	1,0 0	16.638,00 0,00	1,0 0	26.321.000 ,00							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bapped a)
4	[SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.03.0 003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah(Laporan)			1,0 0	50.223,50 0,00	0,0 0	11.631,50 0,00	0,0 0	4.155.000 ,00	0,0 0	0,00	1,0 0	31.680,20 0,00	1,0 0	47.466.700 ,00							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bapped a)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024) yang di evaluasi	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							I		II		III		IV							
	1	2	3	4	5	6	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R
		Pembangunan Daerah																		
		[PROGRAM] 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang/tematik(%)	11.145.264 .316,00	11.667.78 7.080,00	100 ,00	2.784.522 .738,00	25	238.544.4 00,00	44, 00	758.240.8 49,00	21, 00	757.003.7 90,00	10	97960488 7	100 ,00	2.733.393. 926,00	14.401.18 1.006,00	129, 21	
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang PPM(%)	261.232.64 2,00	4.499.974. 691,00	100 ,00	784.520.4 38,00	25, 00	14410350 0	44, 00	21243695 0	21, 00	23811120 0	10, 00	25270906 9	100 ,00	760.529.71 9,00	5.426.382. 479,00	2.07 7,22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bapped a)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0 002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan(Laporan)			2,0 0	8.846.700 ,00	0,0 0	1.920.000 ,00	1,0 0	3.640.000 ,00	1,0 0	0,00	0,0 0	3.270.000 ,00	2,0 0	8.830.000, 00			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bapped a)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0 004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan(Laporan)			4,0 0	300.370.2 00,00	0,0 0	11.700.50 0,00	1,0 0	1.527.050 ,00	2,0 0	181.778.2 00,00	1,0 0	104.553.0 00,00	4,0 0	299.558.75 0,00			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bapped a)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0 008 Koordinasi Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD			10, 00	475.303.5 38,00	1,0 0	130.483.0 00,00	3,0 0	207.269.9 00,00	3,0 0	56.333.00 0,00	3,0 0	144.886.0 69,00	10, 00	452.140.96 9,00			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	K	R	K	R				
		Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	pada Bidang Pembangunan Manusia(Laporan )														(bapped a)				
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang PSDA(%)	337.057.96 0,00	3.337.101. 042,00	100 ,00	780.681.2 50,00	25, 00	24873900	44, 00	15650170 0	21, 00	22981730 0	50, 00	35394570 0	100 ,00	765.138.60 0,00	4.456.185. 342,00	1.32 2,08	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bapped a)	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0 001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)(Dokumen)					2,0 0	3.700.000 ,00	0,0 0	600.000,0	1,0 0	0,00	1,0 0	1.100.000 ,00	0,0 0	1.470.000 ,00	2,0 0	3.170.000, 00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bapped a)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0 004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Perekonomian(Laporan)					3,0 0	293.724.0 00,00	0,0 0	0,00	0,0 0	0,00	1,0 0	98.040.00 0,00	2,0 0	192.285.0 00,00	3,0 0	290.325.00 0,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bapped a)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0 005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan					2,0 0	14.518.40 0,00	0,0 0	2.442.500	1,0 0	1.611.000 ,00	1,0 0	7.384.000 ,00	0,0 0	2.642.500 ,00	2,0 0	14.080.000 ,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bapped a)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	K R	K R	K R	K R	K R	K R	K R	K R	K R		
		SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	RKPD)(Dokumen)																					
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0 008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA(Laporan)																					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bapped a)
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang IW(%)	2.651.613.437,00	2.937.937.460,00	100,00	1.219.321,050,00	25,00	69567000	44,00	41980019	21,9	34540829	10,00	37295011	100,00	1.207.725,607,00	4.518.613,185,00	170,41			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bapped a)		
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0 001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)																				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bapped a)	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0 004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur(Laporan)																				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bapped a)	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi																					Badan Perencanaan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
							I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
		008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahana	Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Kewilayahana(Laporan)																						Pembangunan Daerah (bappeda)	
2			Percentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik(%)				100,00		17,00		17,00		25,00		41											Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Percentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang PPM(%)	261.232.642,00	4.499.974.691,00	100,00	784.520.438,00	0,00	144103500	25,00	212436950	25,00	238111200	50,00	252709069	100,00	760.529.719,00	5.426.382,479,00	2,077,22							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0 002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan(Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan(Laporan)					2,00	8.846.700,00	0,00	1.920.000,00	1,00	3.640.000,00	1,00	0,00	0,00	3.270.000,00	2,00	8.830.000,00							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0 008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia(Laporan)					10,00	475.303,538,00	1,00	130.483,000,00	3,00	207.269,900,00	3,00	56.333,000,00	3,00	144.886,000,00	10,00	452.140,969,00							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							I		II		III		IV								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R				
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase capaian kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik PPM(%)	261.232,64 2,00		4.499.974. 691,00	100 .00	784.520,4 38,00	17, 00	14410350 0	17, 00	21243695 0	25, 00	23811120 0	41, 00	25270906 9	100 .00	760.529,71 9,00	5.426.382. 479,00	2,07 7,22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0 002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan(Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan(Laporan)					2,0 0	8.846.700 .00	0,0	1.920.000 .00	1,0 0	3.640.000 .00	1,0 0	0,00	0,0 0	3.270.000 .00	2,0 0	8.830.000, 00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0 008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia(Laporan )	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia(Laporan )					10, 00	475.303,5 38,00	1,0 0	130.483,0 00,00	3,0 0	207.269,9 00,00	3,0 0	56.333,00 0,00	3,0 0	144.886,0 69,00	10, 00	452.140,96 9,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase ketepatan evaluasi dokumentasi perencanaan Bidang PSDA(%)	337.057,96 0,00		3.337.101. 042,00	100 .00	780.681,2 50,00	0,0 0	24873900	25, 00	15650170 0	25, 00	22981730 0	50, 00	35394570 0	100 .00	765.138,60 0,00	4.456.185. 342,00	1,32 2,08	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0 003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah					4,0 0	135.319,8 50,00	0,0 .00	7.870.000 .00	1,0 0	56.115,70 0,00	1,0 0	6.727.000 .00	2,0 0	54.745,00 0,00	4,0 0	125.457,70 0,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
							I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	K R	K R	K R	K R	K R	K R	K R	K R	K R	K R	K R		
		Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bidang Perekonomian(Laporan)																							
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase capaian kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik PSDA(%)	337.057,96 0,00	3.337.101. 042,00	100 ,00	780.681,2 50,00	17, 00	24873900	17, 00	15650170 0	25, 00	22981730 0	41, 00	35394570 0	100 ,00	765.138,60 0,00	4.456.185. 342,00		1.32 2,08	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)					
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian(Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian(Laporan)					4,0 0	135.319,8 50,00	0,0	7.870.000 ,00	1,0 0	56.115,70 0,00	1,0 0	6.727.000 ,00	2,0 0	54.745,00 0,00	4,0 0	125.457,70 0,00			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)				
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang IW(%)	2.651.613. 437,00	2.937.937. 460,00	100 ,00	1.219.321 .050,00	0,0	69567000	25, 00	41980019 9	25, 00	34540829 0	10, 00	37295011 8	100 ,00	1.207.725. 607,00	4.518.613. 185,00		170, 41	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)					
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur(Laporan)					7,0 0	753.398,5 50,00	0,0	32.871.00 0,00	4,0 0	359.365,1 99,00	1,0 0	64.563,79 0,00	2,0 0	286.318,2 09,00	7,0 0	743.118,19 8,00			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)				
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang	Persentase capaian kinerja Perencanaan Pembangunan	2.651.613. 437,00	2.937.937. 460,00	100 ,00	1.219.321 .050,00	17, 00	69567000	17, 00	41980019 9	25, 00	34540829 0	41, 00	37295011 8	100 ,00	1.207.725. 607,00	4.518.613. 185,00		170, 41	Badan Perencanaan Pembangunan					

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
							I		II		III		IV															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R
		Infrastruktur dan Kewilayahahan	Bidang/Tematik IW(%)																									Daerah (bapped a)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0 004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Infrastruktur(Laporan)				7,0 0	753.398,5 50,00	0,0 0	32.871,00 0,00	4,0 0	359.365,1 99,00	1,0 0	64.563,79 0,00	2,0 0	286.318,2 09,00	7,0 0	743.118,19 8,00										Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bapped a)
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan gunaan Daerah		Persentase Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah(persen)				100 ,00																					Badan Perencanaan Pembangunan gunaan Daerah (bapped a)
2		[PROGRAM] 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan(%)				100 ,00		17		0,0 0		20, 00		10	44120147 2	100 ,00	1.122.765, 117,00		5.416.415, 554,00		106, 31						
3		[KEGIATAN] 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan(%)	100.000,00 0,00	179.151,6 50,00	100 ,00	70.525,00 0,00	17, 00	1045000 0,0	0,0 0	6680000 0,0	20, 00	22935000 63, 00	0,0 0	32623904 100 ,00	100 ,00	63.283.904 ,00		275.059,4 58,00		275, 06						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bapped a)	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.02.0 001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan)				1,0 0	70.525,00 0,00	0,0 0	1.045.000 ,00	0,0 0	6.680.000 ,00	0,0 0	22.935.00 0,00	1,0 0	32.623.90 4,00	1,0 0	63.283.904 ,00									Badan Perencanaan Pembangunan gunaan Daerah (bapped a)	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							I				II		III		IV							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R			
		Pembangunan Daerah)(Dokumen)																				
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangungan Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Daerah yang dijalankan Perangkat Daerah(persen)						100 ,00													Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
2		[PROGRAM] 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN NGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Agenda Riset dengan Isu Strategis Daerah(%)	1.887.052.250,00		1.844.646.682,00	100 ,00	598.675.850,00	0,0 0	7.861.500 ,00	35,00	23.573.000,00	30,00	306.033.600,00	35	202810159	100 ,00	540.278.259,00	2.587.735.100,00	137,13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
3		[KEGIATAN] 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil-Hasil Riset yang difasilitasi(%)	223.702,387,00		506.332,129,00	100 ,00	494.675,850,00	0,0 0	7861500	35,00	23573000	30,00	30603360	35,00	103331404	100 ,00	440.799,504,00	1.050.463,037,00	469,58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
4		[SUB KEGIATAN] 5.05.02.2.04.0 001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi(Dokumen)					1,0 0	178.892,800,00	0,0 0	0,0 0	1.470.000 ,00	1,0 0	153.021,100,00	0,0 0	6.388.211 ,00	1,0 0	160.879,311,00			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
4		[SUB KEGIATAN] 5.05.02.2.04.0 004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan(Laporan)					1,0 0	315.783,050,00	0,0 0	7.861.500 ,00	0,0 0	22.103.000,00	0,0 0	153.012,500,00	1,0 0	96.943,193,00	1,0 0	279.920,193,00			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
1	Meningkatnya Tatakelola Birokra	Nilai SAKIP PD(nilai)						84 (A)													Badan Perencanaan Pembangunan	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							I		II		III		IV								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R				
	si Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel																	Daerah (bappeda)			
2	[PROGRAM] 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)		216.147.18 2.212,00		28.468.71 3.411,15	84,00	8.184.922 .304,00	0,0	1.566.464 .131,00	0,0	1.912.967 .030,00	85,09	1.517.904 .336,00	0	25690076 42	85,09	7.566.343. 139,00	36.035.05 6.550,15	16,6 7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3	[KEGIATAN] 5.01.01.2.01.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai(%)		110.000,00 0,00		42.518.81 1,00	100,00	10.627,50 0,00	25,00	0	25,00	600000	25,00	1518000 25,00	8157176 .00	100,00	10.275.176, ,00	60.951.16 3,00	55,4 1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
4	[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen )					3,0 0	6.800.000 ,00	0,0	0,00	0,0	600.000,0	3,0 0	1.518.000 .00	0,0	4.342.375 0,00	3,0 0	6.460.375, 00			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4	[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					11,00	3.827.500 ,00	4,0 0	0,00	3,0 0	0,00	2,0 0	0,00	2,0 0	3.814.801 0,00	11,00	3.814.801, 00			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan		Percentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(persen)				90,50													Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							I		II		III		IV							
	1	2	3	4	5	6	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R
yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel																				
	[PROGRAM] 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Realisasi Anggaran(%)		216.147.18 2.212,00	25.899.70 5.769,15	90, 5	8.184.922 .304,00	17. 66	1.566.464 .131,00	30, 00	1.912.967 .030,00	14, 34	1.517.904 .336,00	31. 64	25690076 42	93, 64	7.566.343. 139,00	36.035.05 6.550,15	16,6 7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
	[KEGIATAN] 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran(%)		33.541.627 .101,00	21.698.09 9.182,00	90, 5	6.443.795 .000,00	17. 66	14795995 24	30, 00	17817644 20	14, 34	13545081 83	31, 64	15974457 31	93, 64	6.213.317. 858,00	29.508.86 2.771,00	87,9 8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
	[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.02.0 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)				39, 00	6.443.795 .000,00	0,0 0	1.479.599 .524,00	0,0 0	1.781.764 .420,00	38, 00	1.354.508 .183,00	38, 00	1.597.445 .731,00	38, 00	6.213.317. 858,00			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel		IP ASN PD(nilai)				85, 90														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
	[PROGRAM] 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Indeks Profesionalitas ASN(nilai)		1.072.890. 000,00	349.507.7 50,00	85, 90		0,0 0	0	0,0 0	0	0,0 0	0	84, 01	0	84, 01	0,00	349.507.7 50,00	32,5 8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							I		II		III		IV							
	1	2	3	4	5	6	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R
		HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA																		(bapped a)
		[KEGIATAN] 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN(nilai)	1.072.890.000,00	349.507.750,00	85,90	0,0	0	0,0	0	0,0	0	84,01	0	84,01	0,00	349.507.750,00	32,58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bapped a)	
1	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)				2,00														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bapped a)
2		[PROGRAM] 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)	216.147.182.212,00	25.899.705.769,15	2,00	8.184.922,304,00	0	1.566.464,131,00	0,0	1.912.967,030,00	0,0	1.517.904,336,00	2	2569007642	2,00	7.566.343,139,00	36.035,056.550,15	16,67	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bapped a)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai(%)	12.733.895,466,00	1.801.714,818,00	100,00	1.111.025,404,00	15,60	31288675	37,50	68982900	25,00	83905760	25,00	8157176	100,00	10.275.176,00	60.951,163,00	55,41	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bapped a)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket )			1,00	813.868,528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.980,00,00	1,00	693.923,050,00	1,00	737.903,050,00			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bapped a)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024) yang di evaluasi	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							I		II		III		IV							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R			
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket )			12,00	25.000,00	3,00	0,00	3,00	9.944,500 ,00	3,00	10.459,500 ,00	3,00	4.018,000 ,00	12,00	24.422,000 ,00			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bapped a)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket )			4,00	53.488,483,00	0,00	7.170,000 ,00	1,00	4.736,500 ,00	2,00	7.764,230 ,00	1,00	21.825,680,00	4,00	41.496,410 ,00			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bapped a)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)			4,00	5.250,000 ,00	1,00	1.950,000 ,00	1,00	1.300,000 ,00	1,00	975.000,00	1,00	975.000,00	4,00	5.200,000,00			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bapped a)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0 007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket )			6,00	145.000,00,00	0,00	0,00	2,00	50.021,900,00	2,00	8.640,000 ,00	2,00	57.866,456,00	6,00	116.528,356,00			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bapped a)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)			12,00	9.668,393 ,00	3,00	0,00	3,00	1.080,000 ,00	3,00	2.237,250 ,00	3,00	4.652,939 ,00	12,00	7.970,189,00			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bapped a)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)			12,00	58.750,00	3,00	22.168,675,00	3,00	1.900,000 ,00	3,00	9.849,780 ,00	3,00	20.485,809,00	12,00	54.404,264 ,00			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bapped a)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.08	Persentase Penyediaan Jasa	1.046.061.134,00	594.635,536,00	100,00	201.500,00,00	25,00	37544062	25,00	33741045	25,00	31829931	25,00	32103921	100,00	135.218,959,00	761.958,416,00	72,84	Badan Perencanaan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
							I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan(%)																							naan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)				12,00	24.000.00	3,00	3.504.981	3,00	3.484.085	3,00	3.464.031	3,00	3.423.081	12,00	13.876.178								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)				12,00	177.500.00	3,00	34.039.08	3,00	30.256.96	3,00	28.365.90	3,00	28.680.84	12,00	121.342.78								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)	1.829.626.447,00	1.312.399.672,15	100,00	417.974.400,00	11,00	18031870	32,00	27878665	25,00	46142462	32,00	12755388	100,00	219.606.877,00		1.659.560.429,15			90,70				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.09.0 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)				40,00	115.044.892,00	7,00	6.031.870	10,00	2.218.950	11,00	27.549.871,00	12,00	55.934.690,00	40,00	91.735.381,00								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.09.0 009 Pemeliharaan/	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang				3,00	277.999,508,00	0,0	12.000,00	1,00	17.834,71	0,0	16.082,59	2,00	58.319,19	3,00	104.236,49								Badan Perencanaan Pembangunan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
							I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	K R	K R	K R	K R	K R	K R	K R	K R	K R	K R	K R	K R	
		Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)																							Daerah (bapped a)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.09.0 010 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)				6,0 0	24.930.00 0,00	0,0 0	0,00	2,0 0	7.825.000 ,00	2,0 0	2.510.000 ,00	2,0 0	13.300.00 0,00	6,0 0	23.635.000 ,00								Badan Perencanaan Penggunaan Daerah (bapped a)
	[Target Capaian Sub Kegiatan]																									
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4																					
	[Faktor Pendong Keberhasilan Kinerja]	1. Terdapat kegiatan yang harus dilaksanakan pada TW I sehingga menjadi pendorong utk realisasi target kinerja dan anggaran. 2. Telah dilaksanakan serangkaian proses perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan daerah maupun OPD sejak akhir tahun 2024 serta di awal tahun 2025.	# BIDANG URUSAN PERENCANAAN 1. Anggaran di bidang telah direncanakan sesuai dengan timeline, di semester I ini kegiatan yang terbanyak adalah kegiatan rapat koordinasi, asistensi dan mengikuti rapat baik dari Provinsi maupun kegiatan rapat di dalam wilayah Kabupaten Mojokerto 2. Ada beberapa kegiatan yang anggaran kasnya yang realisasinya pada awal semester II, agar sesuai dengan #URUSAN PERENCANAAN: Pelaksanaan urusan perencanaan pada triwulan III Tahun 2025 memperoleh dorongan signifikan dari kuantitas kolaborasi dan koordinasi antarperangkat daerah dalam proses penyusunan dokumen perencanaan strategis maupun tahunan. Komitmen lintas perangkat daerah dalam menyediakan data pembangunan yang akurat turut memperlancar penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025, RKPD Tahun 2026, serta RPJMD Tahun 2025–2029. Pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, forum tematik serta desk perencanaan berjalan efektif sebagai ruang harmonisasi kebijakan sosial dan pendidikan. Di bidang perekonomian dan sumber daya alam, dukungan regulasi nasional serta keterlibatan aktif instansi teknik memperkuat arah kebijakan pengembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Sementara pada bidang infrastruktur dan kewilayahan, koordinasi lintas sektor dalam penyelesaian program memastikan keterpaduan antara Triwulan IV.																							

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6	7	K R	K R	K R	K R	K R	K R	K R	K R	K R	K R	K R	K R	K R	K R
			timeline maka kegiatan dimaksud dilaksanakan sesuai jadwal yaitu pada bulan Juni-Juli untuk kegiatan penyusunan dokumen/laporan subkegiatan	rencana tata ruang dan prioritas pembangunan wilayah. #URUSAN LITBANG Pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan pada triwulan III Tahun 2025 berjalan cukup solid berkat penguatan kolaborasi antara Bappeda, perangkat daerah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian. Sinergi ini memperlancar pelaksanaan kajian tematik yang mendukung penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 serta mendorong lahirnya rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian daerah. Forum diseminasi dan konsultasi yang digelar selama periode ini juga membantu memperluas pemahaman lintas sektor terhadap hasil kajian yang relevan dengan prioritas pembangunan. Di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, kerja sama dengan institusi akademik berkontribusi pada peningkatan kualitas riset sosial dan pendidikan. Pada bidang perekonomian dan sumber daya alam, dukungan pendanaan serta ketersediaan data riset sektoral membantu pemetaan potensi ekonomi lokal secara lebih tajam. Sementara itu, di bidang infrastruktur dan kewilayahan, hasil analisis spasial dan kajian daya dukung lingkungan menjadi rujukan penting dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan wilayah.	# BIDANG URUSAN LITBANG 1. Sudah dilakukan koordinasi dan sosialisasi terkait Inovasi Daerah dengan semua OPD 2. Sudah dilakukan rapat koordinasi dengan OPD terkait dan pihak ketiga  # SEKRETARIAT 1. Tersedianya template dan guidance dari Bappeda serta penguatan mekanisme SIPD-Perencanaan 2. Pemanfaatan AKSARA sebagai acuan pengukuran kinerja dan baseline capaian indikator 3. Pemanfaatan e-Katalog Lokal Mojokerto mempercepat procurement alat kantor															

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II		III		IV		
1	2	3	4	5	6	7	K R	K R	K R	K R	K R	K R	K R	K R	K R
			4. Adanya stock opname untuk bahan rutin seperti ATK dan bahan pemenuhan kegiatan 5. Telah disusun daftar prioritas perbaikan gedung berdasarkan survei terhadap kerusakan gedung 6. Terdapat checklist teknis sarpras per triwulan sebagai alat pantau kondisi fisik	kedisiplinan pelaporan dan komitmen terhadap ketepatan waktu realisasi anggaran mendukung kelancaran kegiatan perencanaan dan litbang di seluruh bidang. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan teknis turut memperkuat profesionalitas dalam pelaksanaan tugas keselektoriat. Dukungan perangkat daerah lain dalam penyediaan layanan umum, keamanan, dan kebersihan lingkungan kerja juga berkontribusi terhadap terciptanya suasana kerja yang kondusif.											
[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]		1. Belum semua OPD mengirimkan dokumen perencanaan dan laporannya tepat waktu untuk dilaksanakan verifikasi 2. Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan yang belum optimal 3. Belum optimalnya peran OPD dalam perumusan judul/tema kajian (berbeda yang datang rapat dengan yg memang membutuhkan) 4. Belum optimalnya peran OPD dalam input data inovasi, seperti Perubahan perubahan juknis, seperti Perubahan	# BIDANG URUSAN PERENCANAAN 1. Untuk realisasi perjalanan dinas, menyesuaikan dengan kegiatan apakah ada undangan rapat di Provinsi atau kebutuhan monitoring bersama dengan Perangkat daerah lainnya 2. Penyerapan honorarium narasumber juga disesuaikan dengan kegiatan tematik, karena untuk pelaksanaannya juga menyesuaikan dengan kegiatan dari provinsi utamanya pada tahun 2025 ini #URUSAN LITBANG: Pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan pada triwulan III Tahun 2025 masih menghadapi	#URUSAN PERENCANAAN: Pelaksanaan urusan perencanaan pada triwulan III Tahun 2025 masih menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi kelancaran proses perencanaan fintas bidang. Keterlambatan sebagian perangkat daerah dalam menyampaikan data dan laporan pendukung menyebabkan perlunya penyesuaian jadwal pada tahap finalisasi Perubahan RKP D Tahun 2025, RKP D Tahun 2026, dan RPJMD Tahun 2025–2029. Pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi tematik belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan sumber data sektoral yang mutakhib. Di bidang perekonomian dan sumber daya alam, dinamika kebijakan nasional dan fluktuasi kondisi ekonomi regional menimbulkan ketidakpastian dalam perumusan arah prioritas program. Sementara itu, pada bidang infrastruktur dan kewilayahannya, masih terdapat perbedaan persepsi antarinstansi teknik terkait prioritas spasial dan kesesuaian program pembangunan wilayah. #URUSAN LITBANG: Pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan pada triwulan III Tahun 2025 masih menghadapi	1. Penyesuaian tujuan, sasaran, dan indikator pada Perubahan Renja 2025 memerlukan proses harmonisasi lanjutan agar konsistensi logika perencanaan tetap terjaga hingga level program, kegiatan, dan subkegiatan. 2. Sinkronisasi antara indikator perencanaan, indikator kinerja, dan indikator evaluasi belum sepenuhnya berjalan mulus, khususnya pada kegiatan yang baru menghasilkan output substantif di akhir tahun anggaran. 3. Kegiatan yang bersifat analitis dan evaluatif (pengendalian, monev, riset, dan pengukuran indeks) memiliki karakter waktu pelaksanaan yang relatif sempit di Triwulan IV, sehingga ruang penyesuaian substantif menjadi terbatas. 4. Proses konsolidasi lintas dokumen perencanaan dan evaluasi (Renja, Renstra, RPJMD, dan hasil monev) membutuhkan ketelitian tinggi untuk menjaga koherensi kebijakan, yang berimplikasi pada meningkatnya kompleksitas kerja perencanaan.										

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							I		II		III		IV					
1	2	3	4	5	6	7	K R	K R	K R	K R	K R	K R	K R	K R	K R			
		Adanya efisiensi belanja pada APBD 2025 sehingga harus merubah prioritas pelaksanaan subkegiatan yang berdampak pada proses pelaksanaan kegiatan	Juknis Konvergensi Stunting dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan. Sehingga penyerapannya belum bisa maksimal.  # BIDANG URUSAN LITBANG 1. Kurangnya Pemenuhan Data Dukung dari OPD Terkait Penyusunan Dokumen RIPJPD 2. Kurang Pemenuhan Data Dukung dari OPD untuk inovasi OPD 3. Kurang Optimalnya OPD dalam Menggali potensi inovasi di lingkup OPD masing-masing  # SEKRETARIAT 1. Pengadaan suku cadang peralatan tertentu cukup sulit dan tidak tersedi di e-katalog lokal 2. proses LPSE memakan waktu cukup lama 3. Pelaksanaan pekerjaan teknis tidak bisa dilakukan pada jam kerja karena terganggu aktivitas kantor; kontraktor hanya	Juknis Konvergensi Stunting dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan. Sehingga penyerapannya belum bisa maksimal.  # BIDANG URUSAN LITBANG 1. Kurangnya Pemenuhan Data Dukung dari OPD Terkait Penyusunan Dokumen RIPJPD 2. Kurang Pemenuhan Data Dukung dari OPD untuk inovasi OPD 3. Kurang Optimalnya OPD dalam Menggali potensi inovasi di lingkup OPD masing-masing  # SEKRETARIAT 1. Pengadaan suku cadang peralatan tertentu cukup sulit dan tidak tersedi di e-katalog lokal 2. proses LPSE memakan waktu cukup lama 3. Pelaksanaan pekerjaan teknis tidak bisa dilakukan pada jam kerja karena terganggu aktivitas kantor; kontraktor hanya	beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan riset daerah. Keterbatasan data sektoral yang terbarukan dan belum tersedianya repositori hasil penelitian lantas perangkat daerah menyebabkan proses analisis memerlukan waktu lebih panjang. Di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, ketersediaan data mikro untuk riset sosial masih terbatas, sehingga pembahasan hasil penelitian belum sepenuhnya komprehensif. Pada bidang perekonomian dan sumber daya alam, keterbatasan dukungan anggaran riset inovasi dan belum optimalnya sinergi dengan pelaku usaha menjadi tantangan dalam memperdalam analisis potensi ekonomi lokal. Sementara itu, di bidang infrastruktur dan kewilayahan, minimnya pemanfaatan teknologi geospasial dalam riset kebijakan ruang menghambat integrasi hasil kajian dengan dokumen perencanaan spasial. Kondisi tersebut secara keseluruhan menunjukkan perlunya pengujian tata kelola riset, penyediaan data terbuka, serta kolaborasi berkelanjutan antarinstansi untuk memastikan penelitian dan pengembangan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan perencanaan daerah.  #URUSAN KESEKRETARIAT Pelaksanaan urusan kesekretariatan pada triwulan III Tahun 2025 masih menghadapi beberapa kendala yang berpengaruh terhadap efektivitas layanan administrasi dan dukungan operasional kelembagaan. Keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia pada beberapa fungsi teknis menyebabkan beban kerja administrasi belum terdistribusi secara optimal. Proses penyusunan terhadap sistem aplikasi administrasi dan keuangan berbasis digital juga masih memerlukan pendampingan, terutama bagi aparatur dengan tingkat literasi teknologi yang bervariasi. Dari sisi sarana dan prasarana,													

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							I		II		III		IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	K	R	
			K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R
		dapat bekerja sore/malam 4. Waktu servis kendaraan yang berbenturan dengan jadwal dinas lapangan; proses perpanjangan STNK/Pajak memerlukan waktu antre 5. Fluktuasi harga dan waktu pengiriman barang dari penyedia lokal menyebabkan keterlambatan penyediaan 6. Terjadi keterlambatan upload Renja pada SIPD karena gangguan server pusat	kebutuhan pemeliharaan rutin terhadap peralatan kerja dan jaringan komunikasi belum seluruhnya terpenuhi, sehingga kadang menghambat kelancaran layanan. Selain itu, dinamika permintaan dukungan kegiatan lintas bidang yang cukup tinggi menyebabkan penjadwalan tugas kesekretariatan harus dilakukan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi.													
[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya ]	1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan semua OPD 2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi utk percepatan proses bisnis 3. melaksanakan koordinasi dan dialog untuk membahas tidak hanya ketersediaan/ketercukupan data saja namun juga pada aspek validitas dan relevansi data tsb. 4. Pengoptimalan evaluasi thdp inovasi-inovasi	# BIDANG URUSAN PERENCANAAN 1. Ada kegiatan Bappeda yang sinergi dengan Perangkat daerah lainnya, seperti rakor ATS, Rakor Stunting, Rakor Gertas, Rakor SDG's, Rakor TKPK/Kemiskinan, Rakor PUG, Rakor Kab Layak Anak, Rakor Keamanan pangan, maka agar kegiatan tersebut bisa terlaksanakan sesuai timeline yang ditetapkan, maka perlu	- Fokus diarahkan pada optimisasi pemantauan hasil implementasi dokument perencanaan serta persiapan bahan evaluasi akhir tahun untuk memastikan keterpaduan antara capaian kinerja dan target pembangunan daerah. - Diperlukan langkah intensif berupa pemantapan integrasi hasil penelitian dengan agenda perencanaan 2026 serta peningkatan kemitraan riset terapan yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. - Fokus diarahkan pada penyelesaian seluruh realisasi keuangan dan kegiatan penunjang kinerja kelembagaan, serta peningkatan efektivitas dukungan administrasi untuk evaluasi akhir tahun.													



No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)	Unit Perangkat at Daerah Penanggung Jawab		
							I	II	III	IV						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
			permintaan cetakan, dan pelaporan kerusakan sarpras 3. Penjadwalan ulang agenda besar seperti rehab gedung atau perawatan kendaraan agar tidak berbenturan dengan kegiatan rutin harian 4. Penyusunan kontrak servis tahunan untuk sarana vital seperti AC, printer, dan jaringan, guna menghindari keterlambatan penanganan													
[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat at Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikut nya ]	1. semua kegiatan yang dilaksanakan di TW I tahun 2025 sudah sesuai target yang telah ditentukan, dan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan TW II tahun 2025. 2. Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan	1. masih adanya kegiatan yang belum sesuai target kinerja, agar di koordinasikan dengan bidang-bidang atau PPTK akan target masing-masing sub kegiatan yang belum tercapai sesuai target	- Penekanan diarahkan pada konsolidasi pelaksanaan Renstra Bappeda 2025–2029, dengan fokus pada peningkatan IPPD dan adopsi kebijakan berbasis riset serta penerapan pendekatan THIS dalam sistem perencanaan berbasis SIPD dan dokumen tematik prioritas. - Fokus diarahkan pada peningkatan tingkat adopsi kebijakan berbasis riset dan inovasi serta pembentukan ekosistem kolaborasi pengetahuan yang mendukung implementasi THIS dalam konteks pembangunan berbasis bukti. - Langkah strategis diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola internal agar mampu menunjang implementasi Renstra Bappeda 2025–2029 secara adaptif dan efisien.	1. Menjadikan hasil evaluasi tahunan Renja 2025 sebagai dasar empiris dalam penyempurnaan desain Renja 2026. 2. Penajaman indikator, target, dan tahapan kinerja agar lebih mencerminkan siklus kebijakan yang realistik dan dapat dievaluasi secara lintas triwulan. 3. Penguatan integrasi antara perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta penelitian dan pengembangan sebagai satu kesatuan sistem manajemen pembangunan daerah. 4. Penempatan Renja 2026 sebagai instrumen transisi strategis untuk memastikan kesinambungan pencapaian sasaran RPJMD 2025–2029.												



**BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN MOJOKERTO**